

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**



OLEH:

**PUTRI NOVILIA
NIM. 150604164**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Novilia
NIM : 150604164
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab ataskarya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Putri Novilia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh :

Putri Novilia
NIM: 150604164

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Maimun SE, Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,
AR-RANIRY

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197704281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan
Di Provinsi Aceh**

Putri Novilia
NIM: 150604164

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Januari 2022
10 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Maimun SE, Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris,

Abrar Amri, SE, S.Pd.I, M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,

Dr. Idaryani, SE, M.Si
NIDN. 0105057503

Penguji II,

Jabilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Novilia
NIM : 150604164
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : putrii.novilia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 25 Juli 2021

Mengetahui:
AR - RANIRY

Penulis

Putri Novilia
NIM. 150604164

Pembimbing I

Dr. Maimun SE, Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Abrah Amri SE, S.Pd.I, M.Si
NIDN. 0122078601

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul afal :

al-madinah al-munawwarah/ :

al-madinatul munawwarah

talhah :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

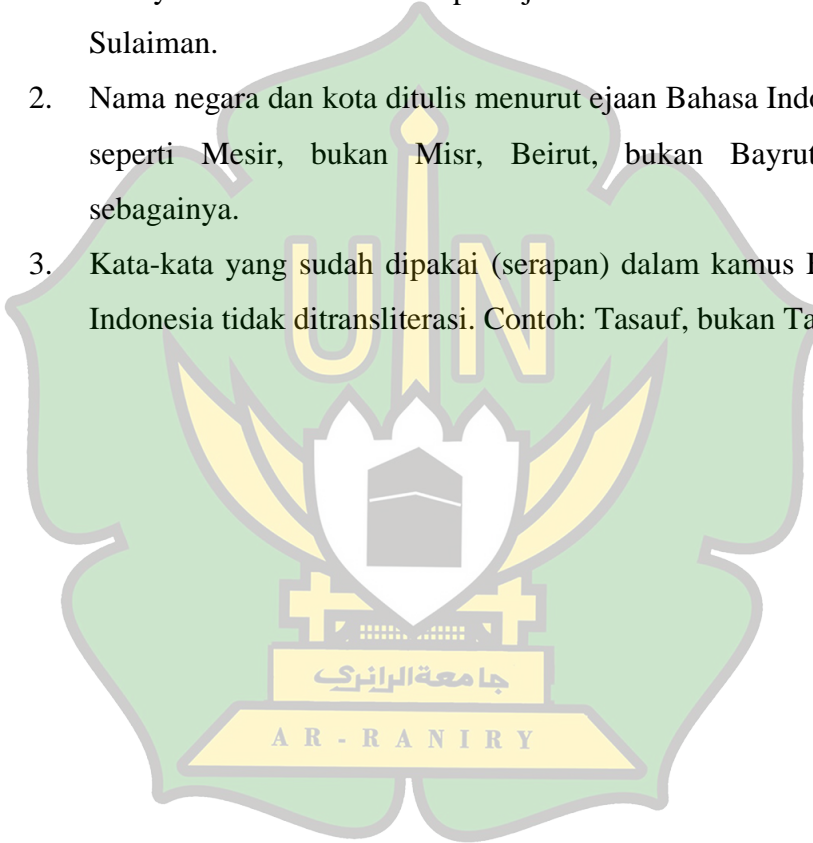
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Putri Novilia
NIM : 150604164
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kemiskinan Di Provinsi Aceh
Tebal Skripsi : 111 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Maimun SE, Ak.M.Si
Pembimbing II : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2010 – 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan *cross section* pada 23 kabupaten / kota di Provinsi Aceh dan *time series* selama 10 tahun. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

**Kata Kunci : Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia,
Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan**

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kemiskinan	14
2.1.1 Pengertian Kemiskinan.....	14
2.1.2 Jenis – Jenis Kemiskinan.....	15
2.1.3 Karakteristik Kemiskinan.....	16
2.1.4 Ukuran kemiskinan.....	19
2.1.5 Teknik penghitungan GKM.....	20
2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	23
2.1.7 Indikator Kemiskinan	26
2.2 Pendidikan.....	28
2.2.1 Definisi Pendidikan	28
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan...	30
2.2.3 Indikator Pendidikan	33
2.3 Pengangguran.....	36
2.3.1 Teori Pengangguran	36
2.3.2 Jenis-jenis Pengangguran	37
2.3.3 Dampak Pengangguran.....	40
2.3.4 Indikator Pengangguran	46
2.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	46
2.4.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	46
2.4.2 Teori Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	48
2.4.3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia	49

2.5	Penelitian Terkait	50
2.6	Kerangka Pemikiran.....	53
2.7	Hipotesis.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		55
3.1	Rancangan Penelitian	55
3.2	Lokasi Penelitian	55
3.3	Jenis Dan Sumber Data	55
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5	Populasi dan Sampel	57
3.6	Variabel Penelitian.....	57
3.7	Definisi Operasional.....	58
3.8	Model Analisis Data.....	60
3.9	Tekhnik Analisis Data.....	61
	3.9.1 Penentuan Model Estimasi	62
	3.9.2 Tahapan Pengujian Model.....	63
3.10	Pengujian Hipotesis.....	64
	3.10.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	64
	3.10.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	66
4.3	Pembahasan.....	84
	4.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	88
BAB V PENUTUP		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	57
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	65
Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020	65
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020.....	68
Tabel 4.4 Tingkat pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020	70
Tabel 4.5 IPMdi Provinsi Aceh Tahun 2010-2020	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	75
Tabel 4.7 Hasil Hausman Test	77
Tabel 4.8 Fixed Effect Model.....	78
Tabel 4.9 Regresi Fixed Effect Model.....	80



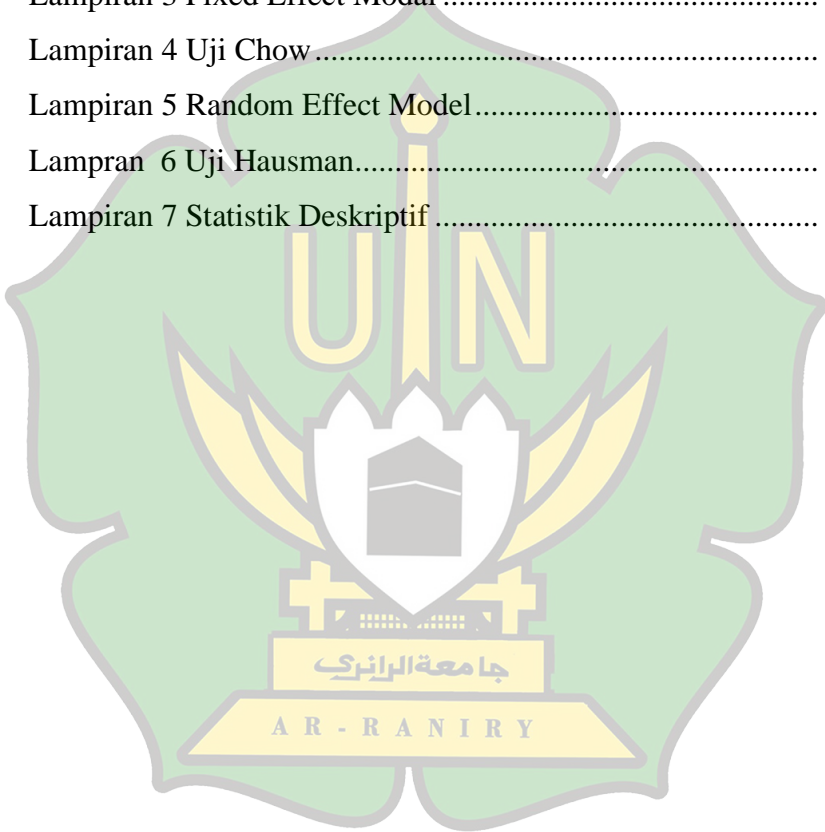
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2006-2020.....	2
Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2016-2019	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Analisis Regresi Panel.....	96
Lampiran 2 Common Effect Model.....	105
Lampiran 3 Fixed Effect Modal	106
Lampiran 4 Uji Chow.....	107
Lampiran 5 Random Effect Model.....	108
Lampran 6 Uji Hausman.....	109
Lampiran 7 Statistik Deskriptif	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang serta memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 yaitu sebesar 27,55 juta jiwa, meningkat 1,13 juta jiwa terhadap maret 2020 dengan peningkatan 2,76 juta jiwa pada September 2019 (BPS, 2021).

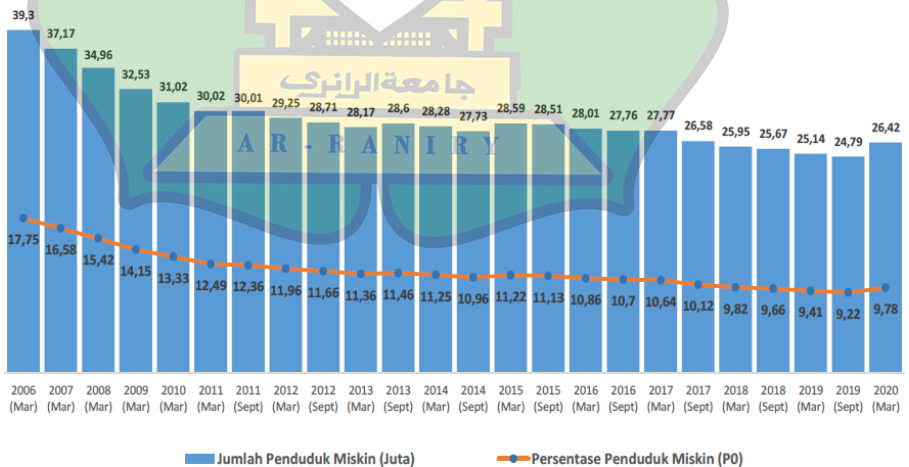
Kemiskinan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional. Masalah kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Oleh karena kemiskinan bersifat multidimensional maka kemiskinan membutuhkan solusi yang multidimensional pula. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, salah satu diantaranya yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dimana tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan nasional rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Apabila tingkat pendapatan perkapita yang dicapai oleh suatu negara tinggi namun tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka masalah kemiskinan akan tetap ada

bahkan kemiskinan akan menuju tingkat keparahan. Begitu pula sebaliknya jika distribusi pendapatan merata tetapi rata-rata tingkat pendapatan perkapita rendah maka kemiskinan akan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataanya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi perkembangan dalam lima tahun terakhir (2006 sampai tahun 2020) baik dari segi persentase maupun dari jumlah kemiskinan. Fluktuasi jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Berikut perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2006 - 2020 yang disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Grafik 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2006-2020



Sumber: Data Diolah dari data survey sosial ekonomi nasional (Susenas, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Susenas pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang.

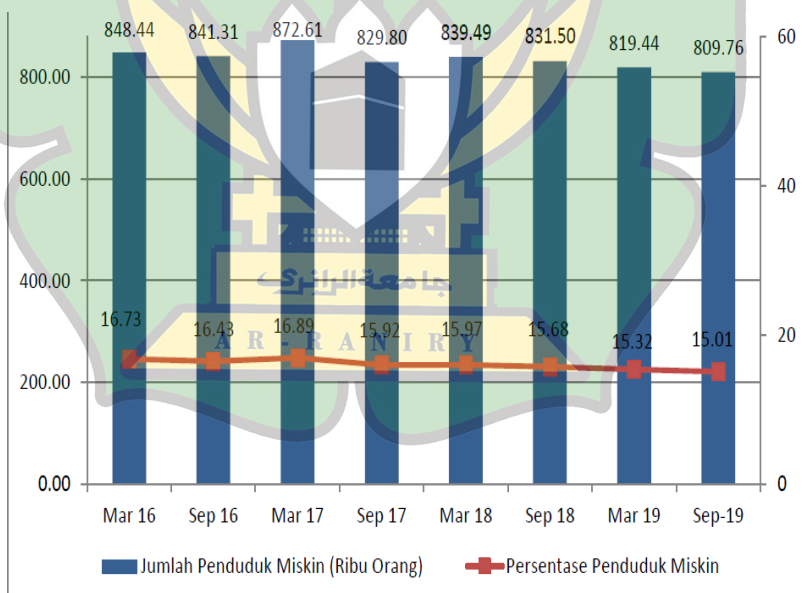
Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Tidak hanya di Indonesia, Provinsi Aceh juga salah satu Provinsi yang tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Zamzami (2021) dalam media Kompas rilis yang diterbitkan, Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal menjelaskan, jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebanyak 833.910 orang atau 15,43 persen. Jumlah itu bertambah 19.000 orang dibandingkan Maret 2020, yakni 814.910 orang. Dalam enam bulan tersebut, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin atau dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen. Sedangkan di daerah pedesaan angkanya naik 0,50 poin atau dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen. Pada September 2020, garis kemiskinan Aceh Rp 524.208 per kapita, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,847, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,831 dan Gini Ratio 0,319.

Angka kemiskinan di provinsi Aceh masih sangat tinggi jika di bandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Oleh karena itu persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (Agustina, Syechalad, dan Hamzah 2018)

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Provinsi Aceh berfluktuatif . Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2016-2019



Sumber: Susenas, 2016-2019

Berdasarkan Grafik di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh fluktuatif, dimana tahun 2016 jumlah penduduk

miskin sebesar 848.44 ribu jiwa sementara persentase penduduk miskin sebesar 16.73 persen. Tahun 2017 jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh meningkat yaitu sebesar 872.61 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 16.89 persen. Kemudian tahun 2019 jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 809.79 ribu jiwa.

Penurunan ini diikuti oleh persentase penduduk miskin yaitu sebesar 15.01 persen. Menurut BPS (2020) Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan bisa ditimbulkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan (Sjafi'i dan Hidayanti, 2009). Maka dari itu pemerintah Provinsi Aceh juga punya pekerjaan besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara perbaikan akses pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi. Kualitas sumber daya manusia dalam dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu pengukuran komposit dalam mengukur pencapaian kualitas hidup manusia (Subandi, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik IPM merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Indikator yang berperan penting dalam menaikkan IPM ialah akses yang mudah untuk mendapatkan Pendidikan.

Masalah pendidikan di Provinsi Aceh pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan dan manajemen sekolah, untuk itu berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintahan Aceh diantaranya dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan mutu tenaga pengajar sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas. Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Pendidikan harus perlu diberikan perhatian khusus, sebab Pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Untuk mencermati keberhasilan tingkat pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator namun penelitian ini mengambil salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pendidikan di provinsi Aceh adalah dengan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 10 tahun ke atas.

Rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterbatasan modal menjadi beberapa sebab dari munculnya kemiskinan. Pendidikan dan keterbatasan modal manusia berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupan mereka. Masyarakat tentunya menginginkan kehidupan yang layak seperti tercukupinya sandang, pangan, papan dan pendidikan yang cukup

untuk menjalani hidup. Indeks pembangunan manusia (IPM) menggambarkan pembangunan kualitas hidup manusia sehinggabisa mencapai kehidupan yang layak (di atas garis kemiskinan) (leonita dan Sari, 2019).

Pendidikan menjadi faktor penting kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, tingkat pendidikan yang tinggi mengindikasikan produktivitas manusia yang tinggi yang memudahkan masuk dalam pasar tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan, sehingga kemungkinan akan keluar dari golongan kemiskinan. Kegiatan inilah yang sering digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran dimana salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud (Agustina, Syechalad, dan Hamzah 2018)

Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti pembantu rumah tangga. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang

beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya (Mulyadi, 2016).

Kemiskinan berhubungan erat dengan kesempatan kerja yang ada di pasar tenaga kerja. Kenaikan kesempatan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah, artinya sumber daya manusia memiliki kualitas terampil sehingga dapat meningkatkan produktivitas, produktivitas meningkat akan menaikkan tingkat pendapatan nasional. Perkembangan ini akan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan (Sukirno, 2016).

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu wilayah seharusnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, namun pada kenyataannya terdapat beberapa daerah kaya akan sumber daya alam tetapi masyarakat miskin masih tinggi. seharusnya kekayaan alam yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memiliki kesempatan lebih besar dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan baik dari segi pengelolaan dana maupun pembangunan yang belum optimal, khususnya di daerah yang tergolong kaya akan sumber daya alam (Zaini, 2014).

Penelitian Wibowo (2015) Pendidikan diyakini memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan karena pendidikan membekali manusia dengan pengetahuan dan

meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya mencapai taraf hidup atau standar hidup yang lebih tinggi. Pendidikan mengajarkan peserta didik bahwa berbagai persoalan hidup manusia, termasuk keterpurukan dan kesengsaraan karena kemiskinan, dapat diatasi. Melalui pendidikan, peserta didik mengetahui bagaimana upaya mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan. Berbagai pengetahuan, baik konsep teori maupun aplikasinya diajarkan dan, dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui bagaimana mencapai kehidupan yang lebih maju atau mencapai standar hidup yang lebih tinggi.

Penelitian Leonita dan Sari (2019) pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia berhubungan dengan kemiskinan. Pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Pemerintah diharapkan fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pendapatan daerah meningkat, maka diharapkan pengangguran berkurang dan tingkat kemiskinan juga berkurang. IPM juga tentunya memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah karena dengan membangun manusia yang baik diharapkan akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

Kemudian Penelitian Safuridar dan Putri (2019) variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Meriyanti (2015) hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2011- 2014.

Menurut Suliswanto (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia juga berpengaruh negative terhadap kemiskinan. Kemudian dalam penelitian Mukhtar, saptono, dan Arifin (2019) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Menurut hasil penelitian Suripto dan Subayil (2020) Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah (2018) mengatakan bahwa pengangguran dan Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Wibowo (2014) menurut hasil penelitiannya pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode 2002 – 2011.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Berapa besar pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Berapa besar pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Berapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemiskinan.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait masalah kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Maksud dari sistematika penulisan adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh isi dari skripsi ini yang disusun dengan komprehensif dan sistematis. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk memudahkan pada pembahasan skripsi, adapun pada setiap babnya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara ringkas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang memuat teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut dijelaskan dari yang paling umum sampai khusus berdasarkan penelitian ini yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Tergolong Miskin Di Provinsi Aceh temuan penelitian terkait, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

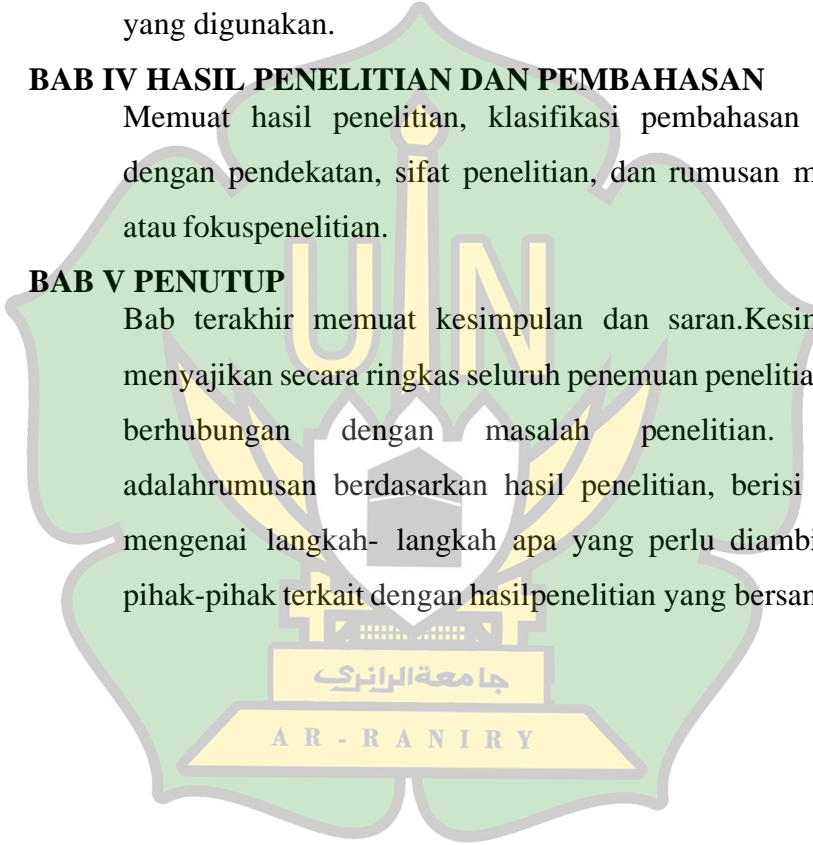
Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, tujuan serta arah penelitian. Data dan teknik pengumpulan data, penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian, klasifikasi pembahasan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Saran adalah rumusan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah- langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, pendidikan, dan kesehatan, (Maipita, 2014:8).

Menurut Sen dalam Hajji (2010), kemiskinan adalah kegagalan untuk berfungsinya beberapa dasar atau dengan perkataan lain seseorang dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai atau mendapatkan kapabilitas dasar ini. Kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*).

Menurut bank dunia (2000) dalam (Maipita, 2014:8) Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan atau kemiskinan yaitu kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Inti dari kedua sudut pandang tersebut adalah ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan pokok atau hidup layak, yakni yang disebut dengan kemiskinan menurut *basic needs approach*.

Nurkse (dalam Kuncoro, 2006) mendeskripsikan dalam teori lingkup kemiskinan bahwa ketertinggalan, kecacatan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi terutama investasi sumber daya manusia.

2.1.2 Jenis – Jenis Kemiskinan

Menurut Maipita (2014:29) kemiskinan dapat digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kemiskinan Struktural, disebut juga kemiskinan buatan (*man made poverty*) disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.
2. Kemiskinan Alamiah, disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
3. Kemiskinan Kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau bekerja, tidak disiplin, dan sebagainya.

4. Kemiskinan Absolut, adalah kemiskinan yang dipandang dari sisi kemampuan yang memenuhi kebutuhan dasar minimum.
5. Kemiskinan Relatif, adalah kemiskinan yang biasanya diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tertinggi (kelompok bawah dan kelompok atas).

2.1.3 Karakteristik Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa karakteristik kemiskinan di kategorikan dalam empat jenis yaitu (BPS, 2020):

1. Karakteristik Sosial Demografis, yaitu karakteristik yang dilihat dari profil rumah tangga miskin berupa rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.
2. Karakteristik Pendidikan yaitu pendidikan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Lulusan pendidikan tinggi berpeluang rendah menjadi miskin. Pada karakteristik pendidikan dapat dilihat pada kepala rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf.
3. Karakteristik Ketenagakerjaan yaitu dilihat pada sumber penghasilan utama yang merupakan indikator kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya

perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan.

4. Karakteristik Perumahan yaitu karakteristik yang menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga diantaranya yaitu:
 - a. Luas lantai yaitu Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m²
 - b. Jenis lantai yaitu Persentase rumah tangga miskin dengan jenis lantai tanah (12,63 persen) lebih tinggi dibanding dengan rumah tangga tidak miskin (3,75 persen).
 - c. Jenis atap yaitu menggunakan jenis atapnya ijuk/rumbia
 - d. Jenis dinding yaitu penggunaan jenis dinding kayu, bambu, dan lainnya
 - e. Jenis penerangan yaitu menggunakan jenis listrik PLN dan Non-PLN
 - f. Sumber air yaitu ketersediaan penggunaan air bersih
 - g. Jenis jamban yaitu Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada.

- h. Status pemilik rumah tempat tinggal yaitu status pemilik tempat tinggal dibedakan menjadi rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya.

Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistemik. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Kemiskinan semacam ini termasuk kemiskinan yang paling mendalam dan bersifat kronis. Mereka menerima kondisi hidup sebagaimana adanya, penuh dengan kepasrahan, tidak memperlihatkan keinginan untuk keluar dari kondisi kemelaratan. (Kasim, 2006).

Kriteria lain tentang pendudukan miskin berkenaan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

1. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri.
 2. Akses air bersih dan sanitasi
 3. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran
 4. Kepemilikan aset
 5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizimakanan
 6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru.
- Dari 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor

3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin.(
Kadji)

2.1.4 Ukuran kemiskinan

Ukuran Kemiskinan Garis kemiskinan adalah tingkatpendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan di mana pendapatanseseorang berada di bawah tingkat tersebut, maka ia dikatakanmiskin. Oleh karena itu garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya angka kemiskinan, (Maipita, 2014:34).

Menurut (Maipita, 2014) mengatakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi garis kemiskinan seperti, konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi (letak geografis), dan tingkat harga. Maka garis kemiskinan itu merupakan utilitas minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar ia tidak termasuk dalamkategori miskin, sehingga:

$$GK = f(u) \quad (2.1)$$

Di mana:

GK = Garis kemiskinan, dan

U = Tingkat utilitas minimum.

Utilitas biasanya ditentukan oleh tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa, contoh x_i . Selain tingkat pendapatan y_i , konsumsi juga ditentukan oleh harga dari barang dan jasa itu sendiri, yaitu p_i . Sehingga garis kemiskinan dapat dirumuskan menjadi (tanpa memasukkan unsur pendapatan hanya dari sisi pengeluaran):

$$GK=U_i(x_i, p_i) \quad (2.2)$$

Harga barang dan jasa yang dikonsumsi tidaklah sama untuk setiapdaerah.

Menurut (BPS, 2021) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

2.1.5 Teknik penghitungan GKM

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978.

Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{*jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{*jp} : Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan mejadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

J : Daerah (perkotaan atau pedesaan)

P : Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\bar{H}_{jkp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

\bar{K}_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

\bar{H}_p : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa nonmakanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan

minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Dimana :

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-

makanan daerah j dan p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKPD 2004) dan daerah j

k : jenis komodii non-makanan terpilih

j : daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : provinsi ke- p

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Menurut Maipita (2014:62) menyatakan bahwa kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal, adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, faktor penyebab internal adalah sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam usaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna.

2. Faktor eksternal, adalah faktor yang datang dari luar diri miskin, faktor penyebab eksternal adalah terkucilkan, akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, dan sumber daya alam yang terbatas.

Berdasarkan Spicker dalam Maipita, (2014:60) berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab, yaitu:

1. Individual explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin tersebut.
2. Familial explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan.
3. Subcultural explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena kultur, kebiasaan, adat-istiadat atau karakteristik perilaku lingkungan.
4. Structural explanation, mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja.

Menurut Isdjoyo dalam Maipita, (2014:61) penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Di desa, kemiskinan di desa disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilkan, kemiskinan material, kerentanan, dan sikap.

2. Di kota, penyebab kemiskinan di kota adalah, rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit dan terbatas dalam memperoleh modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut (Kuncoro 2003: 107), penyebab kemiskinan antarlain sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan (Todaro dan Smith, 2011) adalah

1. tingkat pendapatan rendah,
2. laju pertumbuhan ekonomi lambat,
3. distribusi pendapatan tidak merata,
4. fasilitas Kesehatan dan pelayanan yang terbatas,
5. serta fasilitas pendidikan masih belum memadai.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan terhadap perubahan kemiskinan yaitu (Muhdar,2015) :

1. Tingkat dan laju pertumbuhan output
2. Tingkat upah neto
3. Distribusi pendapatan
4. Kesempatan kerja
5. Tingkat inflasi;
6. Pajak dan subsidi
7. Investasi;
8. Alokasi serta kualitas SDA
9. Ketersediaan fasilitas umum
10. Penggunaan teknologi
11. Tingkat dan jenis Pendidikan
12. Kondisi fisik dan alam
13. Politik
14. Bencana alam
15. Peperangan.

2.1.7 Indikator Kemiskinan

BPS dalam Maipita, (2014:54) menyusun beberapa indikator dan kriteria kemiskinan sebagai berikut:

1. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi
2. Jenis lantai terluas terbuat dari kayu murahan, tanah, bambu
3. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa plaster, bamboo, rumbia)
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar

5. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak
 6. Sumber penerangan utama bukan listrik
 7. Bahan bakar untuk masak bersumber pada kayu dan arang
 8. Tidak mampu membeli daging, susu, telur, dan ikan minimal dalam 1 minggu sekali
 9. Makan kurang dari 2 kali sehari
 10. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun
 11. Tidak mampu membayar untuk berobat ke sarana Kesehatan modern
 12. Pendapatan kurang dari Rp. 600.000,- per rumah tangga perbulan
 13. Pendidikan tinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD ke bawah
 14. Kepemilikan tabungan/asset kurang dari Rp.500.000,-
- Dalam hal ini, yang disebut keluarga miskin adalah keluarga atau masyarakat yang memiliki minimal dari 14 indikator di atas.

Indikator utama dari kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan antara anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain, perbedaan SDM dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, buruknya tata

pemerintahan, dan pengelolaan SDA yang berlebihan. (Dalam Diah, 2007)

2.2 Pendidikan

2.2.1 Definisi Pendidikan

Menurut UU Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut Mudyahardjo dalam (Kadir, 2012: 59) menyatakan bahwa pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup.

Menurut Martoyoto (2015) pendidikan adalah suatu dasar pengembangan sumber daya manusia. Sedarmayanti (2016) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisi, dimana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan toeritis untuk tujuan umum. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Marzuki (2010), dalam laporan Bank Dunia (*World Bank*), April 1980, dikemukakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang mencakup semua aspek pembangunan dan memiliki implikasi sebagai berikut. Pertama, pendidikan harus meliputi spectrum yang luas, baik konten maupun bentuknya. Konten punya rentangan yang luas, mulai dari pengetahuan dasar sampai dengan riset; dari latihan keterampilan hidup sampai dengan skills produksi yang canggih; sedangkan bentuk dapat beragam mulai dari sekolah sampai dengan yang sangat spesifik seperti yang terdapat pada pendidikan nonformal, dari yang sederhana keaksaraan sampai dengan *post graduate* atau *specialist*. Kedua, sekolah umum adalah sangat penting atau esensial guna mencapai tujuan pembangunan seperti juga latihan dan keterampilan khusus atau spesifik skills diperlukan jika orang ingin dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan dapat ikut secara konstruktif dalam perubahan itu. Implikasi yang ketiga, investasi di bidang lain sehingga pembelajar dapat terlibat dalam tugas-tugas produktif dalam pertumbuhan ekonomi. Keempat, kesamaan hak dan keadilan dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi nasional saling konsisten. Semakin banyak peluang pendidikan di pedesaan, misalnya, akan meningkatkan keadilan, begitu juga member kontribusi pada

percepatan adopsi dalam memperbaiki metode kerja seperti bertani, pembangunan industry dan pendapatan yang lebih tinggi. Hal yang sama meningkatkan pendidikan bagi wanita, mendorong keadilan dan membantu perkembangan pembangunan nasional.

Pengertian pendidikan bila dikaitkan dengan penyiapan tenaga kerja seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2010), bahwa melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Ditambahkan oleh Effendi (2012), tinggi rendahnya pendidikan tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat produktifnya tenaga kerja itu sendiri. Diakuinya dengan pendidikan yang tinggi, tenaga kerja akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada dalam suatu daerah yang berguna bagi proses produksi dan akhirnya berdampak pada peningkatan penghasilan ekonomi tenaga kerja. Kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah produksi ini akan mengakibatkan perubahan pada nilai pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan

Menurut Hasbullah (2010) pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan yaitu:

1. Ideologi semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.
2. Sosial ekonomi semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
3. Sosial budaya masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.
4. Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju. Psikologi Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.

Dalam aktivitas ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun pendidikan tersebut, meliputi : (Hangestiningsih, Zulfiati & Johan, 2015)

1. Faktor Tujuan

Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya sadar atau tidak sadar selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa,

dengan demikian tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai berikut:

- a. Sebagai arah Pendidikan. Tanpa adanya semacam antisipasi (pandangan ke depan) kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, demikian pula kegiatan-kegiatannya pun tidak akan efisien. Dalam hal ini tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. Sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya.
- b. Tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhirnya. Mungkin saja ada usaha yang terhenti dikarenakan suatu kegagalan mencapai tujuan, namun usaha itu belum bisa dikatakan telah berakhir. Pada umumnya, suatu usaha baru berakhir jika tujuan akhirnya telah tercapai.
- c. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas permulaan suatu usaha. Dengan demikian, antara dasar-dasar dan tujuan terbentangleh garis yang menunjukkan arah bergerak nya usaha tersebut, serta dasar dan tujuan

pendidikan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan antara yang satu dengan yang lain.

- d. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuannyayang lebih luhur dan lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Semua itu terlihat apabila berdasarkan nilai-nilai tertentu.

2.2.3 Indikator Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, danspesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut BPS Aceh (2021) keadaan pendidikan penduduk secara umum dilihat dari beberapa indikator seperti

angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

- 1) Angka Partisipasi Sekolah, angka partisipasi sekolah merupakan indikator paling penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum samasekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.
- 2) Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.
- 3) Angka Melek Huruf, salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4) Rata-rata Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

Kemudian menurut Statistik Pendidikan (2020) yaitu Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian pembangunan yaitu antara lain:

1. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur mudadan dewasa,
2. Angka naik kelas,
3. Angka mengulang,
4. Angka bertahan kelas 5 SD/ sederajat,
5. Angka melanjutkan,
6. Angka putus sekolah,
7. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas,
8. Rata-rata Lama Sekolah penduduk 15 tahun ke atas dan tingkat penyelesaian sekolah.

2.3 Pengangguran

2.3.1 Teori Pengangguran

Menurut Feriyanto (2014), pengangguran di bagi dua yaitu pengangguran terpaksa dan pengangguran sukarela. Pengangguran terpaksa adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak memperoleh pekerjaan walaupun mereka bersedia menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih rendah dari tingkat upah yang seharusnya diterima. Pengangguran sukarela adalah orang atau sekelompok orang yang memilih untuk menganggur dibandingkan menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah dari yang seharusnya diterimanya.

Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Silalahi, Purba, Damanik, & Fahmi, 2013)

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja, dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Di samping memperkecil *output*, pengangguran juga memacu

pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju dimana negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur (Nanga, 2005 : 249).

Menurut teori untuk mencari tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Pengurangan pendapatan dan ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluarannya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan social sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, akibat jangka panjang adanya penurunan GNP dan pendapatan perkapita suatu negara (Silalahi, Purba, Damanik, & Fahmi, 2013).

2.3.2 Jenis-jenis Pengangguran

Untuk membedakan jenis-jenis pengangguran, ada dua cara menggolongkannya yaitu:

1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya

Jenis pengangguran dalam golongan ini dapat di bedakan menjadi empat yaitu:

- a. Pengangguran normal atau friksional adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui tingkat berbagai siklus kehidupan yang berbeda (Nanga, 2005 :249).
- b. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang terjadisebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebab timbulnya pengangguran ini karena adanya kemajuan teknologi (Nanga, 2005: 250).
- c. Pengangguran siklikal perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Dan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Pemerosotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, oleh karena itu pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang berwujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal (Sukirno, 2012:329)

- d. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran ini dapat ditimbulkan karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin mesin dan bahan kimia. contohnya, racun lalang dan rumput, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik adanya robot yang telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin-mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi (Sukirno, 2012:329).
2. Pengangguran berdasarkan cirinya
- a. Pengangguran terbuka adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan lowongan pekerjaan mengakibatkan dalam perekonomian semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan, dampaknya dalam jangka panjang mereka menjadi pengangguran karena tidak ada pekerjaan sama sekali bagi mereka (Hasyim, 2016:201).
 - b. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran tenaga kerja dengan produktivitasnya yang rendah sekali sehingga pegawai/buruh atau petani dapat dipindahkan dari kegiatannya tanpa penurunan produksi (Hasyim, 2016:201).

- c. Pengangguran musiman ini terutama terdapat di sector pertanian dan perikanan. Pada musim kemarau jika suplai air tidak ada petani sawah tidak dapat menggarap lahan sawahnya. Disamping itu di sela-sela waktu setelah tanam yang sudah panen para petani sawah atau petani lahan kering masih punya waktu luang. Apabila pada masa petani sawah tidak melakukan pekerjaan lain, mereka terpaksa menganggur, maka ini yang disebut dengan pengangguran musiman (Hasyim, 2016:202).
- d. Setengah menganggur yaitu penduduk yang berpindah dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang berpindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah sehingga terpaksa menjadi pengangguran. Kemudian ada pula orang yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam dalam sehari (Hasyim, 2016 : 202)

2.3.3 Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat (Nanga, 2005: 254).

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tingkat

kemakmuran. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonominya yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu:

Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau berada di bawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan dicapainya.

Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan akibat buruk bagi kegiatan sektor swasta yaitu pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan

datang. Kemudian pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang.

2. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Adapun Akibat-akibat buruk pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu (Nanga, 2005: 255):

Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.

Kedua, pengangguran menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

Ketiga, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu: Pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan

ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadikarena gangguan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini (Muhdar, 2015):

- a) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- b) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar darimasyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- c) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan

demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat.

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- a) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian;
- b) Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan;
- c) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian Negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran.

Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran yaitu sebagai berikut, (Franita, 2016):

1. Ditinjau dari segi Ekonomi Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

2. Ditinjau dari segi social, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain – lain untuk memenuhi kehidupan mereka.
3. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
5. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan.
6. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya.
7. Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di

Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkatkan laju perekonomiannya.

2.3.4 Indikator Pengangguran

Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang biasanya dinyatakan dalam persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Sukirno, 2013).

2.4 Indeks Pembangunan Manusia

2.4.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia (IPM)/ *human development index* (HDI) diukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia, biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang (Putra, 2018).

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar (Latifah, Rostinsulus & Tumilaar 2017).

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, IPM merupakan variable yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM di bentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. IPM juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu negara, semakin tinggi IPM dalam sebuah negara maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Dan dengan cara meningkatkan kualitas IPM seperti pendidikan, akan menciptakan generasi yang lebih maju dengan demikian maka pengangguranpun akan berkurang (Marhaeni, Yati & Tribudhi 2008).

Salah satu indikator penting yang dianggap lebih holistic dari sekedar pertumbuhan ekonomi adalah *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). HDI merupakan indeks

gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi melek huruf penduduk dewasa (bobot $\frac{3}{4}$) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (bobot $\frac{1}{3}$) dan standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur oleh PDB riil per kapita dalam paritas daya beli (Bariyah, 2015).

Hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapitadan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan. Indonesia telah berupaya memerangi kemiskinan sejak kemerdekaan dengan hasil bervariasi dan hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi pembangunan (Boediono, 2016).

2.4.2 Teori Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia menurut UNDP dalam Hakim (2013) adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (\mathit{index} X_1 + \mathit{index} X_2 + \mathit{Index} X_3)/3$$

Dengan Keterangan sebagai :

X_1 = Lama hidup

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Tingkat kehidupan yang layak

2.4.3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki indikator penting sebagai penyusun indeks pembangunan manusia, yang disebut sebagai penyusun indikator pembangunan manusia. Diantara yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Pengeluaran. Sebagai penjelasan lebih lanjut, berikut disertakan tabel penyusun indikator pembangunan manusia sebagai berikut (BPS, 2018):

- 1) Kesehatan/ umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pendidikan/ pengetahuan
- 3) Pengeluaran

Indikator Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut UNDP (2010) dalam (Maipita 2014: 139) sebagai berikut :

1. Dimensi hidup Panjang dan sehat adalah harapan hidup saat lahir
2. Dimensi akses terhadap pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (diukur dalam tahun) dan harapan sekolah (juga diukur dalam tahun)
3. Dimensi standar hidup layak diukur melalui pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang telah disesuaikan dengan *purchasing power parity* (US\$PPP)

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang membahas mengenai faktor yang menyebabkan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan hasil dari perbedaan dengan penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1	Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, tingkat Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi bali (I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka 2018)	analisis regresi linear berganda	Hasil analisis menunjukkan tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi bali tahun 2011-2016	Persamaan : - variabel bebas pengangguran dan pendidikan Perbedaan : - lokasi penelitian

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
2	<p>Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Saparuddin Mukhtar, Ari Saptono, dan As'ad Samsul Arifin 2019)</p>	<p>Analisis regresi menggunakan <i>Random Effect</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negative Hasil menunjukkan bahwa PDRB, IBM, dan pengangguran secara simultan memberi pengaruh pada kemiskinan.</p>	<p>Persamaan: -Lokasi penelitian Perbedaan : - Lokasi penelitian</p>
3	<p>Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh (Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, dan Abubakar Hamzah 2018)</p>	<p>Regresi Linear Berganda berdasarkan metode OLS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.</p>	<p>Persamaan: -Variabel bebas pengangguran dan Pendidikan Perbedaan: - Variable bebas jumlah penduduk</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

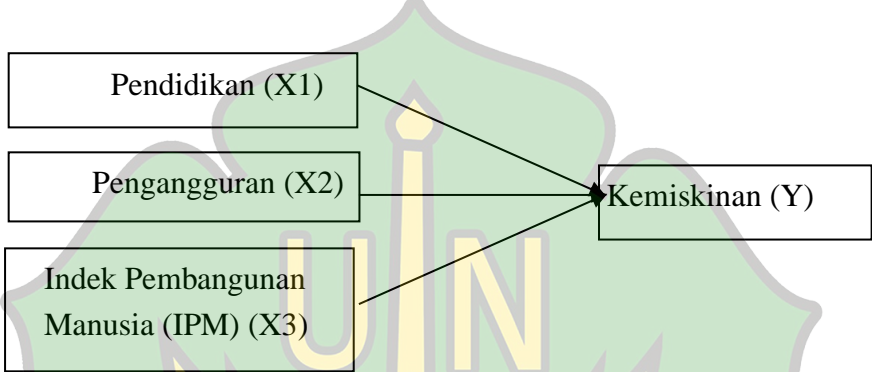
No	Peneliti dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
4	Pengaruh produk Domestik Bruti (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap angka kemiskinan di Indonesia (Muhammad Sri Wahyudi Suliswnto 2010)	Regresi data Panel	hasil penelitaian menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan	Persamaan : -Metode penelitian dan variable bebas IPM Persamaan: - Lokasi penelitian
5	Pengaruh PDRB, Pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia (Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari 2019)	Model regresi data panel	Hasil menunjukkan bahwa PDRB, IBM, dan penganggu terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat penganggur anterbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. ran secara simultan	Persamaan : -Motode penelitian Perbedaan: -Lokasi penelitian
			memberi pengaruh pada kemiskinan.	

Sumber: data diolah (2021)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan dalam bentuk di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2017). Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah.

Dengan mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H_{01} : Diduga pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

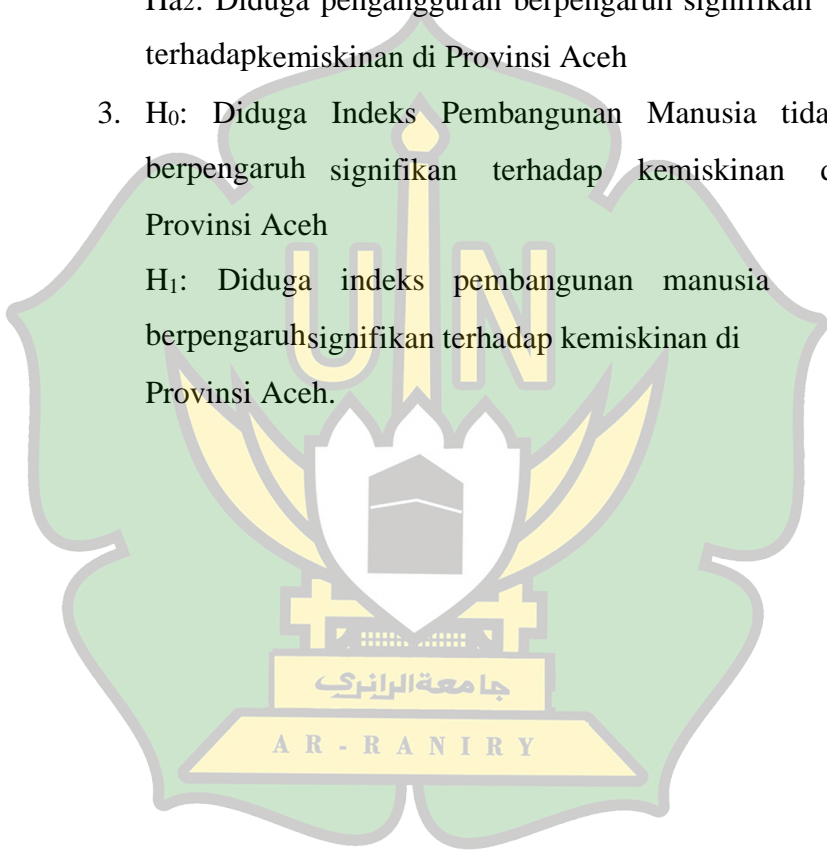
Ha₁: Diduga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

2. H₀₂: Diduga pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

Ha₂: Diduga pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

3. H₀: Diduga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H₁: Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian yang digunakan adalah berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini berbasis pada penelitian eksplanatory. Penelitian eksplanatory merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan atau wilayah yang dijadikan objek penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber di luar organisasi, di antaranya publikasi pemerintah, buku dan majalah. Data sekunder yang digunakan yaitu berbentuk data panel. Data panel ini didapat dari kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data dari

beberapa obyek dalam satu waktu (*cross section*) (Arifianto, 2012). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada penelitian ini data panel berupa data kemiskinan yang didasarkan pada tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh, sebanyak 23 Kabupaten/Kota dengan jenjang waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2010-2020. Sehingga data panel dalam penelitian ini sebanyak $23 \times 10 = 230$ objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data pendidikan Provinsi Aceh tahun 2010-2020 dalam satuan persen (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
- b. Data pengangguran Provinsi Aceh yang berdasarkan angka harapan hidup tahun 2010-2020 dalam satuan persen (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- c. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2010-2020 dalam satuan persen (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- d. Data kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2010-2020 dalam satuan persen (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan cara studi kepustakaan,

mengunjungi tempat pusat kajian, pusat arsip seperti BPS dan melakukan observasi.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi Aceh, yaitu populasi dari Pendidikan, Pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*, data *cross section* pada penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di provinsi aceh dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2010 s/d 2020 (sepuluh periode tahun terakhir).

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel dependen

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan.

2. Variabel Independen

Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel terikat (*dependen*) (Sugiyono, 2017).

1. Pendidikan (X1)
2. Pengangguran (X2)
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3)

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menentukan ukuran dari jenis dan indikator variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini memuat tentang penentuan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan dengan benar. Berikut operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Pendidikan (X1)	pendidikan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisi, dimana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum (Sedarmayanti 2016)	4. angka partisipasi sekolah 5. tingkat pendidikan yang ditamatkan 6. angka melek huruf dan 7. rata-rata lama sekolah (BPS, 2021)

Tabel 3.1 - Lanjutan

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
2	Pengangguran (X2)	Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari kerja tidak disebut sebagai pengangguran (sukirno, 2013)	penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS dalam Sukirno, 2013).
3	Indeks Pembangunan Manusia (X3)	Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. (Latifah dkk, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi hidup Panjang dan sehat adalah harapan hidup saat lahir 2. Dimensi akses terhadap pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (diukur dalam tahun) dan harapan sekolah (juga diukur dalam tahun) 3. Dimensi standar hidup layak diukur melalui pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang telah
			disesuaikan dengan <i>purchasing poer parity</i> (US\$PPP) UNDP (2010) dalam (Maipita 2014: 139)

Tabel 3.1 - Lanjutan

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
4	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika tarafhidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan atau sebagai garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif (Adji, Dkk, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat 2. pembangunan yang bias kota, 3. perbedaan kesempatan antara anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain, 4. perbedaan SDM dan sektor ekonomi, 5. rendahnya produktivitas, 6. budaya hidup yang jelek, 7. buruknya tata pemerintahan, dan pengelolaan SDA yang berlebihan. (Bank dunia dalam Diah, 2007)

3.8 Model Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data seksi silang (*cross section*) dan data rentan waktu (*time series*). Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen pendidikan (X_1), pengangguran (X_2), Indeks Pembangunan Manusia (X_3) terhadap variabel dependen kemiskinan (Y) serta untuk mengetahui seberapa besar dan arah hubungan digunakan analisis regresi data panel dengan metode

Ordinary Least Square (OLS) dan pengolahanya menggunakan alat bantu aplikasi EViews. Model dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it} \quad (3)$$

1)

Dimana:

Y	: Kemiskinan (dalam satuan persen)
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi variabel
PD	: Pendidikan (dalam satuan persen)
P	: Pengangguran (dalam satuan persen)
IPM	: Indeks Pmbangunan Manusia (dalam satuan persen)
e	: Kesalahan prediksi (<i>error term</i>)
i	: Kabupaten
t	: Waktu

3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan model estimasi dengan melakukan pengujian *Chow-test* dan *Housman-test*
- b. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, yang harus memenuhi kriteria yaitu, uji F-test dan uji T-test.

3.9.1 Penentuan Model Estimasi

Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi, yakni *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM) (Hidayat dan Nalle, 2017).

a. Metode *Pooled Least Square* (*Common Effects*)

Model ini dikenal dengan estimasi common effect yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasi data *time series* dengan data *cross section*. Model ini hanya menggabungkan antara dua data tersebut tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.

b. Metode Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effects*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau dummy yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*Fixed Effects*) atau *Least Square Dummy* Variabel atau disebut juga dengan *Covariance Model*. *Fixed Effects* dapat menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Model ini merupakan model yang mengasumsikan koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar anggota panel.

c. Metode Pendekatan Efek Acak (*Random Effects*)

Dalam model ini, parameter-parameter yang berbeda antar daerahmaupun antar waktu dimasukan ke dalam eror, karena inilah model efek acak disebut juga model komponen eror (*Component Model*). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap

3.9.2 Tahapan Pengujian Model

Menurut Husein (2011) Keputusan pemakaian *common effect model*, *fixed effect model* ataupun *random effect model* ditentukan dengan *uji chow* dan *uji hausman test*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uji *chow* digunakan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, model *common effect* atau model *fixed effect model* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *fixed effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 (H_0 diterima) Jika nilai *prob.* < 0.05 (H_0 ditolak)

- b. Uji *hausman* dilakukan dengan tujuan untuk melihat manakah yang lebih tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *fixed effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 (H_0 diterima) Jika nilai *prob.* < 0.05 (H_0 ditolak)

c. *Uji Lagrange Multiplier*

Uji Lagrange Multiplier adalah digunakan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan *common effect* atau *random effect*. Nilai angka yang dibawah yaitu sebesar (0.0000) dimana nilainya (<0,5) sehingga *Lagrange Multiplier Test* ini menunjukkan bahwa menerima H_a yang berarti metode estimasi terbaik adalah *random effect*. Apabila nilai nya (>0,5) maka menerima H_0 yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah *Common Effect*

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan (Sugiyono, 2014:250).

Hipotesis yang digunakan:

1. H_0 : $b_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel jumlah penduduk dan tingkat pendidikan dengan kemiskinan.

2. H1: $b_1 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel antara variabel jumlah penduduk dan tingkat pendidikan dengan kemiskinan.
3. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y)
4. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y)

3.10.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2014:257).

Hipotesis yang digunakan:

5. $H_0: b_1 = 0$ variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
6. $H_1: b_1 \neq 0$ variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" – 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" – 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2018 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 6.514 gampong atau desa.

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara dan Luas Provinsi Aceh 57.956 km².

Keadaan Geografi yaitu Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di delapan lokasi, yaitu Cagar Alam Jantho, Cagar Alam Serbajadi, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, Taman Wisata Alam Jantho, Taman Wisata Alam Kuta Malaka, dan Taman Buru Lingga Isaq. (BPS, 2021).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel penelitian yang dapat digunakan untuk

mengetahui variabel penelitian. Berdasarkan hasil data diolah di dapat nilai statistik deskriptif variabel pendidikan, pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KEMISKINAN	PENDIDIKAN	PENGANGGURAN	IPM
Mean	17.64583	8.749391	7.324304	6852.357
Median	18.00000	8.510000	7.275000	6804.500
Maximum	26.23000	12.65000	17.97000	8541.000
Minimum	6.900000	5.590000	0.370000	5897.000
Std. Dev.	4.094540	1.370775	3.285120	506.0557
Observations	230	230	230	230

Sumber: Eviews 9, diolah penulis, 2021

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan pada Tabel 4.1 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan variabel terikat pada penelitian ini pengukuran kemiskinan didasarkan pada tingkat persentase penduduk. Berdasarkan Tabel 4.1 dari 230 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) kemiskinan adalah sebesar 18.00 dan kemiskinan maksimum sebesar 26.23. Sementara kemiskinan minimum sebesar 6.90 Standar deviasi pada kemiskinan dalam penelitian ini sebesar 4,09. Berikut data kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2010-2020.

Tabel 4.2
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	3,6 1	22, 96	21, 88	20, 57	19, 92	20, 43	19, 93	20, 2	19, 78	18, 99	18, 49
Aceh Singkil	19, 38	18, 93	17, 92	18, 73	17, 77	18, 23	21, 6	22, 11	21, 25	20, 78	20, 20
Aceh Selatan	15, 93	15, 52	14, 81	13, 44	12, 79	13, 23	13, 48	14, 07	14, 01	13, 09	12, 87
Aceh Tenggara	16, 78	16, 39	15, 64	14, 39	13, 75	14, 91	14, 46	14, 86	14, 29	13, 43	13, 21
Aceh Timur	18, 42	18, 01	17, 19	16, 59	15, 88	15, 85	15, 06	15, 25	14, 49	14, 47	14, 08
Aceh Tengah	20, 09	19, 58	18, 78	17, 76	16, 99	17, 51	16, 64	16, 84	15, 58	15, 50	15, 08
Aceh Barat	24, 42	23, 81	22, 76	23, 7	22, 97	22, 38	20, 38	20, 28	19, 31	18, 79	18, 34
Aceh Besar	18, 8	18, 36	17, 2	16, 88	15, 93	16, 13	15, 55	15, 41	14, 47	13, 92	13, 84
Pidie	23, 8	23, 19	22, 12	21, 12	20, 29	21, 18	21, 25	21, 43	20, 47	19, 46	19, 23
Bireuen	19, 5	19, 06	18, 21	17, 65	16, 94	16, 8	15, 95	15, 87	14, 31	13, 56	13, 06
Aceh Utara	23, 43	22, 89	21, 89	20, 34	19, 58	19, 19	19, 46	19, 78	18, 27	17, 39	17, 02
Aceh Barat Daya	19, 93	19, 49	18, 51	18, 92	17, 99	18, 24	18, 03	18, 31	17, 1	16, 26	15, 93

Tabel 4.2 - Lanjutan

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gaya Lues	23,9	23,38	22,31	22,33	21,43	21,42	21,86	21,97	20,7	19,87	19,32
Aceh Tamiang	17,98	17,49	16,7	15,13	14,58	14,56	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08
Nagan Raya	24,06	23,38	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,70
Aceh Jaya	20,17	19,8	18,3	17,53	16,52	15,92	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87
Bener Meriah	26,22	25,5	25,5	23,47	22,45	23,79	21,43	21,14	20,13	19,30	18,89
Pidie Jaya	26,07	24,43	24,35	22,7	21,78	21,93	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19
Banda Aceh	9,19	9,08	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90
Sabang	21,68	21,31	20,51	18,31	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31	15,60	14,94
Langsa	15,01	14,66	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44
Lhokseumawe	14,07	13,73	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,80
Subulussalam	24,36	23,92	22,63	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2010-2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dalam kurun 11 tahun terakhir dapat diketahui Kab/kota setiap tahunnya mengalami fluktuatif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kab/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tahun terakhir tertinggi adalah Aceh singkill

dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,20 persen. Kemudian Kota Banda Aceh menduduki peringkat terendah tingkat kemiskinan yaitu sebesar 6,90 persen.

4.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel bebas pada penelitian ini pengukuran pendidikan diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan tabel 4.1 dari 230 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) pendidikan adalah sebesar 8.74. Dan pendidikan maksimum sebesar 12.65. Sementara pendidikan minimum sebesar 5.59. Standar deviasi pada pendidikan dalam penelitian ini sebesar 1,37. Berikut data pendidikan di Provinsi Aceh tahun 2010-2020.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Simeuleu	8,1 7	8,2 6	8,3 4	8,5 5	8,8 9	8,9 8,9	8,9 1	9,0 6	9,0 7	9,0 8	9,3 4
Aceh Singkil	6,6 5	6,8 6	7,1 6	7,3 3	7,4 8	7,5 7,5	7,6 9	7,8 4	8,0 5	8,5 2	8,5 3
Aceh Selatan	7,5	7,5 3	7,5 6	7,5 9	7,6 7,6	7,7 9	8,0 2	8,3 3	8,3 8	8,5 9	8,8 7
Aceh Tenggara	8,3 8	8,4 5	8,5 7	8,5 8	8,7 7	9,3 2	9,3 3	9,6 3	9,6 4	9,6 5	9,6 6
Aceh Timur	7,0 4	7,0 9	7,1 3	7,2 8	7,3 8	7,4 7,4	7,6 7,6	7,8 7,8	7,8 5	7,8 6	8,1 5

Tabel 4.3 - Lanjutan

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh Tengah	9,0 7	9,1 3	9,1 9	9,2 5	9,3 1	9,6 5	9,6 6	9,6 7	9,6 8	9,6 9	9,8 5
Aceh Barat	7,6 4	7,7 1	7,7 7	7,8 3	8,1 7	8,4 7	8,7	9,0 4	9,0 8	9,0 9	9,3 7
Pidie	7,9 4	7,9 6	8,0 8	8,1 5	8,2 4	8,7 4	8,7 5	8,7 6	8,8 1	8,8 2	8,9 9
Bireuen	8,3 4	8,4 5	8,5	8,5 8	8,8 5	9,1 4	9,1 5	9,1 6	9,1 7	9,2 7	9,2 8
Aceh Utara	7,0 5	7,3 9	7,6 9	7,8 3	8,0 6	8,0 7	8,0 8	8,0 9	8,1 1	8,4 6	8,6 3
Aceh Barat Daya	6,9 1	7,4 9	7,5 3	7,6 9	7,8 9	7,9	7,9 3	8,1 2	8,1 3	8,3 5	8,6 6
Gaya Lues	5,5 9	6,2 4	6,8 8	7,0 1	7,0 4	7,0 6	7,1 1	7,3 9	7,6 9	7,9 1	8,2 0
Aceh Tamiang	7,6 1	7,6 4	7,6 6	7,6 9	7,7 1	7,9 5	8,2 1	8,4 7	8,7 1	8,8 9	8,9 0
Nagan Raya	7,1 2	7,3 2	7,7 3	7,7 8	7,9 3	8,2 2	8,2 4	8,2 5	8,2 6	8,5 0	8,6 8
Aceh Jaya	7,1 7	7,3 4	7,6 4	7,7 1	7,8 8	7,8 9	7,9 5	8,1 3	8,3 7	8,6 6	8,7 0
Bener Meriah	7,8 9	8,2 2	8,6 3	8,9 3	9,0 1	9,4 2	9,4 3	9,5 5	9,5 6	9,7 8	9,7 9
Pidie Jaya	7,8 7	7,9 1	7,9 3	7,9 5	8,3 1	8,4 5	8,4 6	8,8 4	8,8 6	9,0 4	9,3 3
Banda Aceh	11, 91	12	12, 07	12, 19	12, 37	12, 38	12, 57	12, 59	12, 6	12, 64	12, 65
Sabang	10, 08	10, 12	10, 16	10, 21	10, 35	10, 37	10, 51	10, 7	10, 97	11, 13	11, 14

Tabel 4.3 - Lanjutan

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Langsa	10,33	10,38	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71	10,9	11,06	11,10	11,11
Lhokseumawe	10	10,08	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53	10,88	10,89	10,90	10,91
Subulussalam	6,3	6,41	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88	6,12	7,39	7,58	7,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2010-2020

Tingkat pendidikan dalam kurun 11 tahun terakhir di Kab/kota yang ada di Provinsi Aceh pada Tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi tahun terakhir diduduki oleh Kota Banda Aceh yaitu sebesar 12,65 persen. Kemudian diikuti oleh Kota Sabang dengan tingkat pendidikan sebesar 11,14 persen. Kemudian tingkat pendidikan paling rendah yaitu Kota Subulussam yaitu sebesar 7.84 persen pada tahun 2020.

4.2.3 Pengangguran

Pengangguran merupakan variabel bebas pada penelitian ini pengukuran pengangguran didasarkan pada tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tabel 4.1 dari 230 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) pengangguran adalah sebesar 7.32 dan pengangguran maksimum sebesar 7.27 Sementara pengangguran minimum sebesar 0.37 Standar deviasi pada kesehatan dalam penelitian ini sebesar 3.28. Berikut data pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2010-2020.

Tabel 4.4
Tingkat pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Kab/Kota	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Simeuleu	5,47	5,82	4,95	3,12	-	8,51	5,57	6,42	8	7,36	12,25
Aceh Singkil	8,24	8,58	7,96	7,14	-	7,03	6,08	11,07	8,96	7,67	9,31
Aceh Selatan	6,54	6,54	6,03	7,24	-	10,01	9,49	7,95	7,21	6,41	11,34
Aceh Tenggara	5,72	3,45	3,75	4,75	-	9,79	9,51	16,82	13,04	7,69	9,9
Aceh Timur	7,26	7,61	6,92	8,42	-	13,89	10,61	11,42	7,26	7,97	6,13
Aceh Tengah	3,05	2,65	2,11	3,91	-	3,13	3,32	2,42	2,22	6,1	2,55
Aceh Barat	7,3	7,41	8,58	6,2	-	6,77	5,86	7,42	6,21	6,39	3,52
Aceh Besar	7,62	7,67	7,29	8,49	-	6,81	10,53	13,15	13,15	7,93	11,6
Pidie	6,45	6,83	7,24	7,64	-	10,25	11,73	8,88	7,19	6,92	7,56
Bireuen	4,12	3,83	3,52	4,5	-	11,02	9,02	9,57	9,97	7,65	7,32
Aceh Utara	8,56	8,65	10,14	11,02	-	17,05	13,58	17,97	15,47	8,68	12,78
Aceh Barat Daya	3,93	4,29	3,93	3,16	-	11,66	6,79	10,3	11,97	6,83	6,14
Gaya Lues	2,01	1,74	2,49	1,71	-	2,24	0,37	1,2	2,97	6,93	4,72

Tabel 4.4 - Lanjutan

Aceh Tamiang	7,9 7	6,0 4	6,2 1	5,4 3	-	14, 03	9,7 5	10, 49	9,1 9	6,7 1	8,0 3
Nagan Raya	5,1 1	5,3 5	5,9 1	4,1 1	-	3,9 7	3,6 9	7,7 7	7,6 3	7,1 3	3,9 4
Aceh Jaya	4,0 8	4,1 8	4,9 1	6,2 3	-	4,9 1	9,4 8	9,6 8	5,9	6,2 9	7,7 8
Bener Meriah	1,3 5	1,0 3	1,0 6	1,0 6	-	1,0 4	0,7 4	0,6 3	1,4 1	5,1 9	2,2 5
Pidie Jaya	6,5 8	4,3 4	5,0 2	4,8 9	-	9,1 8	8,1 6	12, 82	8,5 2	7,9 5	5,8 1
Banda Aceh	9,5 4	6,8 9	7,2 4	7,7 5	-	12	10, 24	9,0 2	7,1 7	8,5 2	11, 56
Sabang	4,8 1	4,6	4,1 9	3	-	7,6 2	7,4 8	12, 5	9,5 3	6,0 6	10, 02
Langsa	9,7 5	7,6 9	7,1 2	7,0 3	-	8,5 5	9,8 9	11, 74	8,7 9	7,6 1	12, 95
Lhokseuma we	11, 99	11, 01	12, 51	10, 51	-	13, 06	11, 23	7,4 6	10, 88	7,6 3	11, 83
Subulussala m	6,9 3	7,2 5	6,4 4	4,9 1	-	8,2 4	8,5 5	9,8 5	8,2 5	8,1 8	4,2 8

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2010-2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dapat di lihat bahwa dalam kurun 11 tahun terakhir pengangguran yang diukur dari tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Lhokseumawe sebesar 11.99 persen. Kemudian kota Langsa dengan sebesar 9,75 persen. Kemudian tingkat pengangguran terendah diduduki oleh Aceh Tengah sebesar 3,05 persen.

4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 4.1 dari 230 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 6852.35 dan Indeks Pembangunan Manusia maksimum sebesar 8541.00. Sementara Indeks Pembangunan Manusia minimum sebesar 5897.00 Standar deviasi pada Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini sebesar 506.05. Berikut data IPM di Provinsi Aceh tahun 2010-2020.

Tabel 4.5
IPM di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

Kab/Kota	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2020
Simeuleu	66,03	65,7	64,74	64,41	63,82	63,16	61,68	61,25	61,03	60,6	66,03
Aceh Singkil	68,94	68,91	68,02	67,37	66,96	66,05	64,87	64,23	63,13	62,36	68,94
Aceh Selatan	67,12	66,9	65,92	65,03	64,13	63,28	62,27	61,69	61,52	61,22	67,12
Aceh Tenggara	69,37	69,36	68,67	68,09	67,48	66,77	65,55	64,99	64,27	63,82	69,37
Aceh Timur	67,63	67,39	66,82	66,32	65,42	64,55	63,27	62,93	62,35	61,75	67,63
Aceh Tengah	73,24	73,14	72,64	72,19	72,04	71,51	70,51	70,18	70,70	69,17	73,24
Aceh Barat	71,38	71,22	70,47	70,2	69,26	68,41	66,86	66,66	66,47	66,05	71,38
Aceh Besar	73,56	73,55	72,73	72,72	71,75	71,7	70,61	70,1	69,94	69,76	73,56
Pidie	70,63	70,41	69,93	69,52	69,06	68,68	67,59	67,3	66,95	66,75	70,63
Bireuen	72,28	72,27	71,37	71,11	70,21	69,77	68,23	67,57	67,03	66,42	72,28
Aceh Utara	69,33	69,22	68,36	67,67	67,19	66,85	65,36	64,82	64,22	63,56	69,33
Aceh Barat Daya	66,75	66,56	65,67	65,09	64,57	63,77	62,62	62,15	61,75	60,91	66,75
Gaya Lues	67,22	66,87	65,88	65,01	64,26	63,67	63,22	62,85	61,91	60,93	67,22

Tabel 4.5 - Lanjutan

Aceh Tamiang	69, 24	69, 23	68, 45	67, 99	67, 41	67, 03	65, 56	65, 21	64, 89	64, 67	69, 24
Nagan Raya	69, 18	69, 11	68, 15	67, 78	67, 32	66, 73	65, 23	64, 91	64, 24	63, 57	69, 18
Aceh Jaya	69, 75	69, 74	68, 83	68, 07	67, 7	67, 53	66, 92	66, 42	65, 17	64, 75	69, 75
Bener Meriah	72, 98	72, 97	72, 14	71, 89	71, 42	70, 62	69, 74	69, 14	68, 24	67, 29	72, 98
Pidie Jaya	73, 2	72, 87	71, 12	71, 73	71, 13	70, 49	69, 26	68, 9	68, 69	68, 38	73, 2
Banda Aceh	85, 41	85, 07	84, 37	83, 95	83, 73	83, 25	81, 84	81, 3	80, 87	80, 36	85, 41
Sabang	75, 78	75, 77	74, 82	74, 1	73, 36	72, 51	71, 07	70, 84	70, 15	69, 7	75, 78
Langsa	77, 17	77, 16	76, 34	75, 89	75, 41	74, 74	73, 4	72, 75	72, 15	71, 79	77, 17
Lhokseuma we	77, 31	77, 3	76, 62	76, 34	75, 78	75, 11	74, 13	73, 55	72, 35	71, 55	77, 31
Subulussala m	64, 93	64, 46	63, 48	62, 88	62, 18	61, 32	60, 11	59, 76	59, 34	58, 97	64, 93

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2010-2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dapat di lihat bahwa dalam kurun 11 tahun terakhir indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Banda Aceh sebesar 85,41 persen. Kemudian tingkat indeks pembangunan manusia terendah diduduki oleh simeulue sebesar 66,03 persen.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yaitu, (a) pendekatan kuadrat terkecil *Common Effect model* (CEM); (b) pendekatan efek tetap *Fixed Effect Model* (FEM); (c) pendekatan efek acak *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk memilih metode terbaik dalam data panel dilakukan *uji goodness of fit* yang berupa *Chow test* dan *Hausman Test*.

4.3.1 Hasil Chow Tes

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji

F Restricted dengan membandingkan nilai cross-section

F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas cross-section $F > \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1 .
- Jika nilai probabilitas cross-section $F < \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0 .

Hasil uji chow dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.1
HASIL UJI CHOW

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	71.208684	(22,204)	0.0000	
Cross-section Chi-square	497.018200	22	0.0000	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.40332	4.180463	9.186380	0.0000
PENDIDIKAN	-1.800991	0.375625	-4.794651	0.0000
PENGANGGURAN	-0.239956	0.060038	-3.996725	0.0001
IPM	-0.000473	0.001016	-0.465736	0.6419
R-squared	0.482387	Mean dependent var	17.64583	
Adjusted R-squared	0.475516	S.D. dependent var	4.094540	
S.E. of regression	2.965317	Akaike info criterion	5.029084	
Sum squared resid	1987.242	Schwarz criterion	5.088876	

Log likelihood	-574.3446	Hannan-Quinn criter.	5.053203
F-statistic	70.20658	Durbin-Watson stat	0.093401
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (2021)

Dari hasil *Chow test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* $< 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3.2 Hasil Hausman Test

Hausman test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Maka digunakan uji dengan nilai *cross-section random*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effects Model*.....

H_1 : *Fixed Effects Model* جامعة

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas *cross-section random* $> \alpha$ (0,05) makaterima H_0 tolak H_1 .
- Jika nilai probabilitas *cross-section random* $< \alpha$ (0,05) makaterima H_a tolak H_0 .

Hasil uji hausman dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.2
HASIL HAUSMANT TEST

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.039213	3	0.0046

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PENDIDIKAN	-0.619988	-0.733482	0.019594	0.4175
PENGANGGURAN	-0.055540	-0.051122	0.000049	0.5259
IPM	-0.006494	-0.005912	0.000000	0.0793

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.97465	4.173074	16.28887	0.0000
PENDIDIKAN	-0.619988	0.413012	-1.501139	0.1349
PENGANGGURAN	-0.055540	0.034262	-1.621050	0.1066
IPM	-0.006494	0.001048	-6.194546	0.0000

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.940363	Mean dependent var		17.64583
Adjusted R-squared	0.933054	S.D. dependent var		4.094540
S.E. of regression	1.059415	Akaike info criterion		3.059439
Sum squared resid	228.9616	Schwarz criterion		3.448092
Log likelihood	-325.8355	Hannan-Quinn criter.		3.216214
F-statistic	128.6674	Durbin-Watson stat		0.505781
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (2021)

Dari hasil *Hausman test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0046 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0046 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 .

Sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.4 Hasil Uji *Goodness of Fit*

Dari hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Fixed Effect Model* Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Fixed Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
FIXED EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.84650	2.626254	26.21471	0.0000
PENDIDIKAN	-0.812929	0.275212	-2.953830	0.0035
PENGANGGURAN	-0.073674	0.022293	-3.304754	0.0011
IPM	-0.006355	0.000674	-9.424786	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.975031	Mean dependent var	24.15283	
Adjusted R-squared	0.971971	S.D. dependent var	9.924502	
S.E. of regression	1.054389	Sum squared resid	226.7942	
F-statistic	318.6392	Durbin-Watson stat	0.742557	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.940109	Mean dependent var	17.64583	
Sum squared resid	229.9381	Durbin-Watson stat	0.515989	

Sumber : Hasil Output Eviews 9 (2021)

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$K = 68.84650 - 0.812929 (PD) - 0.073674 (PG) - 0.006355 (IPM) + e$$

Dimana:

K : Kemiskinan

PD : Pendidikan

PG : Pengangguran

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Nilai konstanta sebesar 68.84650 artinya jika variabel bebas yaitu Pendidikan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia dianggap konstan maka nilai kemiskinan adalah sebesar 68.84650 satu satuan. Pada Tabel 4.8 dapat diketahui sebagai berikut:

Variable pendidikan memiliki probabilitas sebesar 0,0035 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar -0.812929. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pendidikan dengan kemiskinan. Maka artinya, kenaikan satu persen tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.812929% sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Variabel pengangguran memiliki probabilitas sebesar 0,0011 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar -0.073674 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Maka artinya setiap kenaikan satu persen pengangguran akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.073674 % sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Variabel indeks pembangunan manusia memiliki probabilitas sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar -0.006355 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Maka artinya setiap kenaikan satu persen indeks pembangunan manusia maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.006355 % sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

4.5 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi)

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji t (uji parsial), uji f (uji simultan) dan uji R^2 (koefisien determinasi). Berikut hasil dari estimasi *fixed effect model*:

Tabel 4.4
REGRESI FIXED EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.84650	2.626254	26.21471	0.0000
PENDIDIKAN	-0.812929	0.275212	-2.953830	0.0035
PENGANGGURAN	-0.073674	0.022293	-3.304754	0.0011
IPM	-0.006355	0.000674	-9.424786	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.975031	Mean dependent var	24.15283	
Adjusted R-squared	0.971971	S.D. dependent var	9.924502	
S.E. of regression	1.054389	Sum squared resid	226.7942	
F-statistic	318.6392	Durbin-Watson stat	0.742557	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Parsial

Pada tabel 4.9 yang merupakan hasil FEM (*Fixed Effect Model*) yang telah ditentukan *Uji Goodness Of Fit* terdapat hasil Uji t yang diketahui nilai T-statistiknya untuk Kemiskinan yaitu sebesar 26.21471 dengan probabilitas 0,0000 yang berarti lebih kecil dari α 0,05.

Pada variabel pendidikan yaitu sebesar -2.953830 dengan probabilitas 0,0035 yang berarti lebih kecil dari α 0,05 sementara untuk variabel pengangguran nilainya sebesar -3.304754 dengan probabilitas 0,0011.

Kemudian variabel indeks pembangunan manusia nilainya sebesar -9.424786 dengan probabilitas 0,0000 yang berarti lebih kecil dari α 0,05.

Hal ini menunjukkan dalam penelitian ini bahwa variabel X1, X2 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dari hasil regresinya dibuktikan melalui hasil uji signifikansi parameter individu (Uji t).

2. Uji Signifikansi Simultan

Dari hasil estimasi, nilai signifikansi statistik F sebesar $0.000000 < 0,05$, maka model yang dipakai *Fixed Effect Model*. Variabel pendidikan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai *R-square* sebesar

0.97. Artinya model ini memiliki pengaruh antara Pendidikan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia sebesar 97 %, sedangkan selebihnya 3 % dapat dijelaskan oleh variable-bariabellain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pendidikan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini terlihat dari nilai probability sebesar 0,0035 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0.812929. Berdasarkan Arsyad (2016) mengatakan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara

umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin meningkat pula produktivitas orang tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Gillis (2000) ada dua alasan pentingnya pendidikan yaitu tingginya permintaan terhadap pendidikan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan membawa keuntungan untuk masa depan mereka. Kedua, banyaknya hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan status sosial di masyarakat akan lebih terangkat.

Pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kemampuan terutama untuk negara berkembang dalam menyerap teknologi modern yang diperoleh dari negara maju serta mampu mengembangkan produktivitas hingga kapasitas supaya pembangunan yang berkelanjutan dapat diciptakan (Todaro, 2006). Pendidikan berhubungan dengan kemiskinan. Seseorang yang memiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi akan memperoleh tingkat pendapatan yang lebih baik. Apabila seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik maka kecil kemungkinan seseorang tersebut menjadi miskin dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018), Muhaddisin dan Sartiyah (2019) , Susanto, Rochaida, Ulfah (2017) yang mengatakan bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

4.6.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengangguran yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka dengan nilai probability sebesar 0,0011 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0.0736774 yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang bermakna bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tidak searah, yaitu apabila tingkat pengangguran meningkat maka berpotensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya apabila tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan berpotensi untuk naik. Karena yang dianggap menganggur dalam sebuah rumah tangga dan juga kelompok bukan angkatan kerja atau pelajar, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan penganggur tersebut masih memiliki anggota keluarga yang bekerja yang bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk berada di atas garis kemiskinan dengan pendapatan yang tinggi, sehingga fenomena tersebut tidak dianggap dalam kategori miskin karena berada di atas garis kemiskinan walaupun mereka dalam keadaan menganggur.

Berdasarkan hasil penelitian Yacoub (2012) yaitu Fakta empiris menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jadi dalam kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut, orang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk membantu penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Kondisi tersebut (pada tingkat pengangguran yang meningkat dimana tingkat kemiskinan justru tidak ikut meningkat) banyak ditemui di daerah perkotaan. Pada saat kelompok bukan angkatan kerja (pelajar/mahasiswa) menamatkan pendidikan dan masuk dalam kelompok angkatan kerja, tetapi tidak serta merta langsung bekerja, terkadang masa tunggu mendapatkan pekerjaan relatif lama. Selain itu ada juga yang sengaja menarik diri dari dunia kerja karena alasan mencari pekerjaan lebih baik. Kejadian tersebut akan menciptakan pengangguran (terutama terjadi pengangguran terdidik).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yacoub (2012), Astuti (2018) dan Ramdhan, setyadi dan Wijaya (2017) yang mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

4.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini terlihat dari nilai probability sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0.812929

IPM terdiri dari 3 dimensi yang sangat menentukan kualitas hidup manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan hidup layak pendapatan perkapita. Dengan adanya masyarakat sehat dan berpendidikan yang tinggi, maka peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menaik. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan

pendapatan. Sehingga dengan tingginya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum Sukmawati (2018) mengatakan bahwa indeks pemabangunan manusia memiliki pengaruh negative terhadap kemiskinan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan koefisien sebesar -0.812929 dan $p\text{-value}$ $0,0035$. Hal ini yang berarti bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan.
2. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan koefisien sebesar -0.073674 dan $p\text{-value}$ $0,0011$. Maka semakin meningkat pengangguran, kemiskinan semakin berkurang.
3. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien sebesar -0.006355 dan $p\text{-value}$ 0.0000 hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM) maka angka pengangguran akan berkurang.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan saran yaitu untuk berbagai pihak yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk dapat membuat kurikulum pendidikan yang sejalan dengan yang di harapkan agar makin banyaknya masyarakat yang berpendidikan tinggi lulusan perguruan tinggi yang kedepannya bermanfaat bagi negara dan dapat mengurangi angka kemiskinan
2. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran, dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan juga ikut berkurang
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel kesehatan dan PDRB yang disesuaikan dengan kondisi Provinsi Aceh serta menambah periode yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil yang representative.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syehchalad, N, M & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 4(2).
- Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia JENIUS*. 1(3).
- Sjafi'I, A dan Hidayanti, A.N. (2009). Genjot Anggaran Pendidikan-Rendam Kemiskinan, Dalam Gemari. *Edisi 101/tahun X/juni*
- Arifianto, M. D. (2012). *Ekonomitrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). *Aceh Dalam Angka 2010- 2018 Aceh* Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Potret Pendidikan Indonesia statistic Pendidikan* : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *BPS_Statistik Indonesia* : Badan Pusat Statistik.

- Bariyah, N. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan HDI. *Jurnal Ekonomi*.
- Boedionoe. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintas sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Diah, 2007, Program Nasional Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, Pintar Panduan Penulisan, Skripsi
- Effendi, T. N. (2012). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 1(1)
- Feriyanto,N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasabullah. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hasyim, A, I., (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hangestiningsih, E., Zulfiati, M,H & Johan, B, A. (2015). *Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : FKIP Universitas Sarjanwiyata Tamansiswa
- Hidayat, A. S., & Nelle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1)

- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Gillis, Malcom. (2000), *Economic of Development*. New York: WW Norton
& Company Inc.
- Kadir, A. (2012). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Prena Media Group
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*. Jakarta: Indomedia Global.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Kuncoro, M. (2006), *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Latifah, N., Rostinsulus, C, H, D & Tumilaar, L, H R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 17(02).
- Leonita, L dan Sari K, R. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. 3(2).
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Marhaeni, H., Yati, S & Tribudhi M, B (2008). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Martoyo, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya manusia*. Yogyakarta: Penerbit: BPF.
- Marzuki, H. M. (2010). *Pendidikan Nonformal, Dimensi Dalam Keaksaran Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Bandung: Rosda.
- Meriyanti, K, N. (2015). Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014. *Jurnal*. (51)
- Muhaddisin dan Sartiyah. (2019). Pengaruh Zakat Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1(2).
- Muhdar, HM. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Jurnal Al-Buhuts*. 11(1).
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Kajian Vol. 21 No. 3*
- Mukhtar, S., Saptono, A & Arifin, S, A. (2019). The Analysis Of The Effects Human Development Indeks And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia. *JurnalEcoplan*. 2(2).
- Nanga, M., (2005). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, K, A, A, I dan Arka, S. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan, Dan Tingkat Pendidikan

- Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 7(3).
- Prasetyoningrum, K, A dan Sukmawati, S, U. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. 6(2).
- Ramdhan, A, D., Setyadi, D dan Wijaya, A. (2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda. *INOVASI*. 13(1).
- Safuridar dan Putri, I, N. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(1)
- Sedarmayanti. (2010). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, M. B., & Abdul H. (2013). Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*. 9(1)
- Sen dalam Hajiji. 2010. *Perkembangan dan prospek kemandirian pangan*. Bandung : PT Citra Praya
- Silalahi, R., Purba J,A., Damanik, D & Fahmi, M. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Siradjuddin. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ekonomi*.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Unit Penerbit Alfabeta

- Sugiyono. (2014). *“Metode Penelitian Bisnis”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno , S. (2016), *Teori Pengantar Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suliswanto, S, W, M. (2010). Pengaruh Produk Domestic Bruto(PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(2).
- Suripto Dan Subayil, L. (2020). Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1(2).
- Susanto, E., Rochaida, E dan Ulfah, Y. (2017). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *INOVASI*. 13(1).
- Tirtarahardja, U. (2010). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *“Pembangunan Ekonomi”*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo . (2015) . *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A, D. (2014). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Economia*. 10(2).
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*. 8(3).
- Zaini, I. (2014) *Pengantar Ekonomi Makro*. Banten: Kopsyah Baraka
- Zamzami Kompas.com (2021). Aceh Kembali Termiskin di Sumatera, Pengamat Sebut karena Salah Kelola Anggaran. Selasa, 4 Mei 2021.
- <https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/15441631/aceh-kembali-termiskin-di-sumatera-pengamat-sebut-karena-salah-kelola>.

Lampiran 1.**Data Analisis Regresi Panel**

Kota	Kemiskinan	Pendidikan	Pengangguran	Ipm
Simeulue 2010	23,63	8,17	12,25	60,60
Simeulue 2011	22,96	8,26	7,36	61,03
Simeulue 2012	21,88	8,34	8,00	61,25
Simeulue 2013	20,57	8,55	6,42	61,68
Simeulue 2014	19,92	8,89	5,57	62,18
Simeulue 2015	20,43	8,90	8,51	63,16
Simeulue 2016				
Simeulue 2017	20,20	9,06	3,12	64,41
Simeulue 2018	19,78	9,07	4,95	64,74
Simeulue 2019	18,99	9,08	5,82	65,70
Simeulue 2020	17,34	9,34	5,47	66,03
Aceh Singkil 2010	19,39	6,65	9,31	62,36
Aceh Singkil 2011	18,93	6,86	7,67	63,13
Aceh Singkil 2012	17,92	7,16	8,96	64,23
Aceh Singkil 2013	18,73	7,33	11,07	64,87
Aceh Singkil 2014	17,77	7,48	6,08	65,27
Aceh Singkil 2015	21,72	7,50	7,03	66,05
Aceh Singkil 2016				
Aceh Singkil 2017	22,11	7,84	7,14	67,37
Aceh Singkil 2018	21,25	8,05	7,96	68,02
Aceh Singkil 2019	20,78	8,52	8,56	68,91
Aceh Singkil 2020	25,43	8,53	8,24	68,94
Aceh Selatan 2010	15,93	7,50	11,34	61,22
Aceh Selatan 2011	15,52	7,53	6,41	61,52
Aceh Selatan 2012	14,81	7,56	7,21	61,69
Aceh Selatan 2013	13,44	7,59	7,95	62,27
Aceh Selatan 2014	12,79	7,60	9,49	62,35

Aceh Selatan 2015	13,24	7,79	10,01	63,28
Aceh Selatan 2016				
Aceh Selatan 2017	14,07	8,33	7,24	65,03
Aceh Selatan 2018	14,01	8,38	6,03	65,92
Aceh Selatan 2019	13,09	8,59	6,54	66,90
Aceh Selatan 2020	30,91	8,87	6,54	67,12
Aceh Tenggara 2010	16,79	8,38	9,90	63,82
Aceh Tenggara 2011	16,39	8,45	7,69	64,27
Aceh Tenggara 2012	15,64	8,57	13,04	64,99
Aceh Tenggara 2013	14,39	8,58	16,82	65,55
Aceh Tenggara 2014	13,75	8,77	9,51	65,90
Aceh Tenggara 2015	14,91	9,32	9,79	66,77
Aceh Tenggara 2016				
Aceh Tenggara 2017	14,86	9,63	4,75	68,09
Aceh Tenggara 2018	14,29	9,64	3,75	68,67
Aceh Tenggara 2019	13,43	9,65	3,45	69,36
Aceh Tenggara 2020	28,98	9,66	5,72	69,37
Aceh Timur 2010	18,43	7,04	6,13	61,75
Aceh Timur 2011	18,01	7,09	7,97	62,35
Aceh Timur 2012	17,19	7,13	7,26	62,93
Aceh Timur 2013	16,59	7,28	11,42	63,27
Aceh Timur 2014	15,88	7,38	10,61	63,57
Aceh Timur 2015	15,85	7,40	13,89	64,55
Aceh Timur 2016				
Aceh Timur 2017	15,25	7,80	8,42	66,32
Aceh Timur 2018	14,49	7,85	6,92	66,82
Aceh Timur 2019	14,47	7,86	7,61	67,39
Aceh Timur 2020	62,34	8,15	7,26	67,63
Aceh Tengah 2010	20,10	9,07	2,55	69,17
Aceh Tengah 2011	19,58	9,13	6,10	70,00

Aceh Tengah 2012	18,78	9,19	2,22	70,18
Aceh Tengah 2013	17,76	9,25	2,42	70,51
Aceh Tengah 2014	16,99	9,31	3,32	70,96
Aceh Tengah 2015	17,51	9,65	3,13	71,51
Aceh Tengah 2016				
Aceh Tengah 2017	16,84	9,67	3,91	72,19
Aceh Tengah 2018	15,58	9,68	2,11	72,64
Aceh Tengah 2019	15,50	9,69	2,65	73,14
Aceh Tengah 2020	32,48	9,85	3,05	73,24
Aceh Barat 2010	24,43	7,64	3,52	66,05
Aceh Barat 2011	23,81	7,71	6,39	66,47
Aceh Barat 2012	22,76	7,77	6,21	66,66
Aceh Barat 2013	23,70	7,83	7,42	66,86
Aceh Barat 2014	22,97	8,17	5,86	67,31
Aceh Barat 2015	21,46	8,47	6,77	68,41
Aceh Barat 2016				
Aceh Barat 2017	20,28	9,04	6,20	70,20
Aceh Barat 2018	19,31	9,08	8,58	70,47
Aceh Barat 2019	18,79	9,09	7,41	71,22
Aceh Barat 2020	39,06	9,37	7,30	71,38
Aceh Besar 2010	18,80	9,43	11,60	69,76
Aceh Besar 2011	18,36	9,44	7,93	69,94
Aceh Besar 2012	17,50	9,45	13,15	70,10
Aceh Besar 2013	16,88	9,46	13,15	70,61
Aceh Besar 2014	16,13	9,61	10,53	71,06
Aceh Besar 2015	15,93	9,91	6,81	71,70
Aceh Besar 2016				
Aceh Besar 2017	15,41	9,93	8,49	72,00
Aceh Besar 2018	14,47	10,14	7,29	72,73
Aceh Besar 2019	13,92	10,31	7,67	73,55

Aceh Besar 2020	59,70	10,32	7,62	73,56
Pidie 2010	23,80	7,94	7,56	66,75
Pidie 2011	23,19	7,96	6,92	66,95
Pidie 2012	22,12	8,08	7,19	67,30
Pidie 2013	21,12	8,15	8,88	67,59
Pidie 2014	20,29	8,24	11,73	67,87
Pidie 2015	21,18	8,74	10,25	68,68
Pidie 2016				
Pidie 2017	21,43	8,76	7,64	69,52
Pidie 2018	20,47	8,81	7,24	69,93
Pidie 2019	19,46	8,82	6,83	70,41
Pidie 2020	86,39	8,99	6,45	70,63
Bireuen 2010	19,51	8,34	7,32	66,42
Bireuen 2011	19,06	8,45	7,65	67,03
Bireuen 2012	18,21	8,50	9,97	67,57
Bireuen 2013	17,65	8,58	9,57	68,23
Bireuen 2014	16,94	8,85	9,02	68,71
Bireuen 2015	16,94	9,14	11,02	69,77
Bireuen 2016				
Bireuen 2017	15,87	9,16	4,50	71,11
Bireuen 2018	14,31	9,17	3,52	71,37
Bireuen 2019	13,56	9,27	3,83	72,27
Bireuen 2020	62,42	9,28	4,12	72,28
Aceh Utara 2010	23,43	7,05	12,78	63,56
Aceh Utara 2011	22,89	7,39	8,68	64,22
Aceh Utara 2012	21,89	7,69	15,47	64,82
Aceh Utara 2013	20,34	7,83	17,97	65,36
Aceh Utara 2014	19,58	8,06	13,38	65,93
Aceh Utara 2015	19,20	8,07	17,05	66,85
Aceh Utara 2016				

Aceh Utara 2017	19,78	8,09	11,02	67,67
Aceh Utara 2018	18,27	8,11	10,14	68,36
Aceh Utara 2019	17,39	8,46	8,65	69,22
Aceh Utara 2020	106,41	8,63	8,56	69,33
Aceh Barat Daya 2010	19,94	6,91	6,14	60,91
Aceh Barat Daya 2011	19,49	7,49	6,83	61,75
Aceh Barat Daya 2012	18,51	7,53	11,97	62,15
Aceh Barat Daya 2013	18,92	7,69	10,30	62,62
Aceh Barat Daya 2014	17,99	7,89	6,79	63,08
Aceh Barat Daya 2015	18,25	7,90	11,66	63,77
Aceh Barat Daya 2016				
Aceh Barat Daya 2017	18,31	8,12	3,16	65,09
Aceh Barat Daya 2018	17,10	8,13	3,93	65,67
Aceh Barat Daya 2019	16,26	8,35	4,29	66,56
Aceh Barat Daya 2020	24,21	8,66	3,93	66,75
Gayo Lues 2010	23,91	5,59	4,72	60,93
Gayo Lues 2011	23,38	6,24	6,93	61,91
Gayo Lues 2012	22,31	6,88	2,97	62,85
Gayo Lues 2013	22,33	7,00	1,20	63,22
Gayo Lues 2014	21,43	7,04	0,37	63,34
Gayo Lues 2015	21,95	7,06	2,24	63,67
Gayo Lues 2016				
Gayo Lues 2017	21,97	7,39	1,71	65,01
Gayo Lues 2018	20,70	7,69	2,49	65,88
Gayo Lues 2019	19,87	7,91	1,74	66,87
Gayo Lues 2020	18,42	8,20	2,01	67,22

Aceh Tamiang 2010	17,99	7,61	8,03	64,67
Aceh Tamiang 2011	17,49	7,64	6,71	64,89
Aceh Tamiang 2012	16,70	7,66	9,19	65,21
Aceh Tamiang 2013	15,13	7,69	10,49	65,56
Aceh Tamiang 2014	14,58	7,71	9,75	66,09
Aceh Tamiang 2015	14,57	7,95	14,03	67,03
Aceh Tamiang 2016				
Aceh Tamiang 2017	14,69	8,47	5,43	67,99
Aceh Tamiang 2018	14,21	8,70	6,21	68,45
Aceh Tamiang 2019	13,38	8,89	6,04	69,23
Aceh Tamiang 2020	38,93	8,90	7,97	69,24
Nagan Raya 2010	24,07	7,12	3,94	63,57
Nagan Raya 2011	23,38	7,32	7,13	64,24
Nagan Raya 2012	22,27	7,73	7,63	64,91
Nagan Raya 2013	21,75	7,78	7,77	65,23
Nagan Raya 2014	20,85	7,93	3,69	65,58
Nagan Raya 2015	20,13	8,22	3,97	66,73
Nagan Raya 2016				
Nagan Raya 2017	19,34	8,25	4,11	67,78
Nagan Raya 2018	18,97	8,26	5,91	68,15
Nagan Raya 2019	17,97	8,50	5,35	69,11
Nagan Raya 2020	29,99	8,68	5,11	69,18
Aceh Jaya 2010	20,18	7,17	7,78	64,75
Aceh Jaya 2011	19,80	7,34	6,29	65,17
Aceh Jaya 2012	18,30	7,64	5,90	66,42
Aceh Jaya 2013	17,53	7,70	9,68	66,92
Aceh Jaya 2014	16,52	7,88	9,48	67,30
Aceh Jaya 2015	15,93	7,89	4,91	67,53
Aceh Jaya 2016				
Aceh Jaya 2017	14,85	8,13	6,23	68,07

Aceh Jaya 2018	14,16	8,37	4,91	68,83
Aceh Jaya 2019	13,36	8,66	4,18	69,74
Aceh Jaya 2020	12,11	8,70	4,08	69,75
Bener Meriah 2010	26,23	7,89	2,25	67,29
Bener Meriah 2011	25,50	8,22	5,19	68,24
Bener Meriah 2012	24,50	8,63	1,41	69,14
Bener Meriah 2013	23,47	8,93	0,63	69,74
Bener Meriah 2014	22,45	9,00	0,74	70,00
Bener Meriah 2015	21,55	9,42	1,04	70,62
Bener Meriah 2016				
Bener Meriah 2017	21,14	9,55	1,06	71,89
Bener Meriah 2018	20,13	9,56	1,06	72,14
Bener Meriah 2019	19,30	9,78	1,03	72,97
Bener Meriah 2020	28,38	9,79	1,35	72,98
Pidie Jaya 2010	26,08	7,87	5,81	68,38
Pidie Jaya 2011	25,43	7,90	7,95	68,69
Pidie Jaya 2012	24,35	7,93	8,52	68,90
Pidie Jaya 2013	22,70	7,95	12,82	69,26
Pidie Jaya 2014	21,78	8,30	8,16	69,89
Pidie Jaya 2015	21,40	8,45	9,18	70,49
Pidie Jaya 2016				
Pidie Jaya 2017	21,82	8,84	4,89	71,73
Pidie Jaya 2018	20,17	8,86	5,02	71,12
Pidie Jaya 2019	19,31	9,04	4,34	72,87
Pidie Jaya 2020	31,39	9,33	6,58	73,20
Banda Aceh 2010	9,19	11,91	11,56	80,36
Banda Aceh 2011	9,08	12,00	8,52	80,87
Banda Aceh 2012	8,65	12,07	7,17	81,30
Banda Aceh 2013	8,03	12,19	9,02	81,84
Banda Aceh 2014	7,78	12,37	10,24	82,22

Banda Aceh 2015	7,72	12,38	12,00	83,25
Banda Aceh 2016				
Banda Aceh 2017	7,44	12,59	7,75	83,95
Banda Aceh 2018	7,25	12,60	7,24	84,37
Banda Aceh 2019	7,22	12,64	6,89	85,07
Banda Aceh 2020	18,97	12,65	9,54	85,41
Sabang 2010	21,69	10,08	10,02	69,70
Sabang 2011	21,31	10,12	6,06	70,15
Sabang 2012	20,51	10,16	9,53	70,84
Sabang 2013	18,31	10,21	12,50	71,07
Sabang 2014	17,02	10,35	7,48	71,50
Sabang 2015	17,69	10,37	7,62	72,51
Sabang 2016				
Sabang 2017	17,66	10,70	3,00	74,10
Sabang 2018	16,31	10,97	4,19	74,82
Sabang 2019	15,60	11,13	4,60	75,77
Sabang 2020	5,27	11,14	4,81	75,78
Langsa 2010	15,01	10,33	12,95	71,79
Langsa 2011	14,66	10,38	7,61	72,15
Langsa 2012	13,93	10,43	8,79	72,75
Langsa 2013	12,62	10,47	11,74	73,40
Langsa 2014	12,08	10,48	9,89	73,81
Langsa 2015	11,62	10,49	8,55	74,74
Langsa 2016				
Langsa 2017	11,24	10,90	7,03	75,89
Langsa 2018	10,79	11,06	7,12	76,34
Langsa 2019	10,57	11,10	7,69	77,16
Langsa 2020	18,65	11,11	9,75	77,17
Lhokseumawe 2010	14,07	10,00	11,83	71,55
Lhokseumawe 2011	13,73	10,08	7,63	72,35

Lhokseumawe 2012	13,06	10,16	10,88	73,55
Lhokseumawe 2013	12,47	10,37	7,46	74,13
Lhokseumawe 2014	11,93	10,39	11,23	74,44
Lhokseumawe 2015	12,16	10,41	13,06	75,11
Lhokseumawe 2016				
Lhokseumawe 2017	12,32	10,88	10,51	76,34
Lhokseumawe 2018	11,81	10,89	12,51	76,62
Lhokseumawe 2019	11,18	10,90	11,01	77,30
Lhokseumawe 2020	22,69	10,91	11,99	77,31
Subulussalam 2010	24,36	6,30	4,28	58,97
Subulussalam 2011	23,85	6,41	8,18	59,34
Subulussalam 2012	22,64	6,53	8,25	59,76
Subulussalam 2013	20,69	6,65	9,85	60,11
Subulussalam 2014	19,72	6,77	8,55	60,39
Subulussalam 2015	20,39	6,78	8,24	61,32
Subulussalam 2016				
Subulussalam 2017	19,71	6,12	4,91	62,88
Subulussalam 2018	18,51	7,39	6,44	63,48
Subulussalam 2019	17,95	7,58	7,25	64,46
Subulussalam 2020	14,46	7,84	6,93	64,93

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2.

COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/21 Time: 13:05

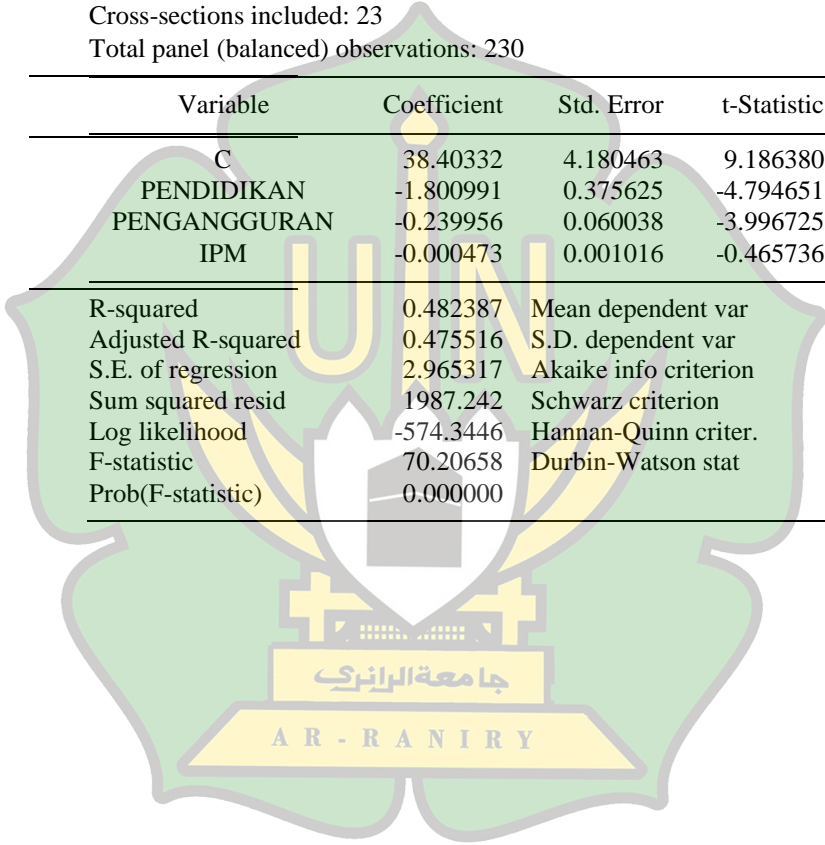
Sample: 2010 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.40332	4.180463	9.186380	0.0000
PENDIDIKAN	-1.800991	0.375625	-4.794651	0.0000
PENGANGGURAN	-0.239956	0.060038	-3.996725	0.0001
IPM	-0.000473	0.001016	-0.465736	0.6419
R-squared	0.482387	Mean dependent var		17.64583
Adjusted R-squared	0.475516	S.D. dependent var		4.094540
S.E. of regression	2.965317	Akaike info criterion		5.029084
Sum squared resid	1987.242	Schwarz criterion		5.088876
Log likelihood	-574.3446	Hannan-Quinn criter.		5.053203
F-statistic	70.20658	Durbin-Watson stat		0.093401
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 3.

Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/15/21 Time: 13:16

Sample: 2010 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.84650	2.626254	26.21471	0.0000
PENDIDIKAN	-0.812929	0.275212	-2.953830	0.0035
PENGANGGURAN	-0.073674	0.022293	-3.304754	0.0011
IPM	-0.006355	0.000674	-9.424786	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.975031	Mean dependent var		24.15283
Adjusted R-squared	0.971971	S.D. dependent var		9.924502
S.E. of regression	1.054389	Sum squared resid		226.7942
F-statistic	318.6392	Durbin-Watson stat		0.742557
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.940109	Mean dependent var		17.64583
Sum squared resid	229.9381	Durbin-Watson stat		0.515989

Lampiran 4.

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.208684	(22,204)	0.0000
Cross-section Chi-square	497.018200	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 07/15/21 Time: 13:19
Sample: 2010 2020
Periods included: 10
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.40332	4.180463	9.186380	0.0000
PENDIDIKAN	-1.800991	0.375625	-4.794651	0.0000
PENGANGGURAN	-0.239956	0.060038	-3.996725	0.0001
IPM	-0.000473	0.001016	-0.465736	0.6419
R-squared	0.482387	Mean dependent var		17.64583
Adjusted R-squared	0.475516	S.D. dependent var		4.094540
S.E. of regression	2.965317	Akaike info criterion		5.029084
Sum squared resid	1987.242	Schwarz criterion		5.088876
Log likelihood	-574.3446	Hannan-Quinn criter.		5.053203
F-statistic	70.20658	Durbin-Watson stat		0.093401
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5.

**Random
Effect Model**

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/15/21 Time: 13:17
 Sample: 2010 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 230
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.95129	4.017912	16.16544	0.0000
PENDIDIKAN	-0.733482	0.388568	-1.887657	0.0604
PENGANGGURAN	-0.051122	0.033547	-1.523921	0.1289
IPM	-0.005912	0.000995	-5.944623	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.736219	0.8696
Idiosyncratic random			1.059415	0.1304
Weighted Statistics				
R-squared	0.653639	Mean dependent var		2.144502
Adjusted R-squared	0.649041	S.D. dependent var		1.827578
S.E. of regression	1.082690	Sum squared resid		264.9212
F-statistic	142.1659	Durbin-Watson stat		0.433719
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.320368	Mean dependent var		17.64583
Sum squared resid	2609.274	Durbin-Watson stat		0.044036

Lampiran 6.

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.039213	3	0.0046

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PENDIDIKAN	-0.619988	-0.733482	0.019594	0.4175
PENGANGGURAN	-0.055540	-0.051122	0.000049	0.5259
IPM	-0.006494	-0.005912	0.000000	0.0793

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/21 Time: 13:20

Sample: 2010 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.97465	4.173074	16.28887	0.0000
PENDIDIKAN	-0.619988	0.413012	-1.501139	0.1349
PENGANGGURAN	-0.055540	0.034262	-1.621050	0.1066
IPM	-0.006494	0.001048	-6.194546	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.940363	Mean dependent var	17.64583
Adjusted R-squared	0.933054	S.D. dependent var	4.094540
S.E. of regression	1.059415	Akaike info criterion	3.059439
Sum squared resid	228.9616	Schwarz criterion	3.448092

Log likelihood	-325.8355	Hannan-Quinn criter.	3.216214
F-statistic	128.6674	Durbin-Watson stat	0.505781
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran. 7

Statistik Deskriptif

Date: 07/25/21
Time: 12:25
Sample: 2010 2020

	KEMISKINAN PENDIDIKAN PENGANGGURAN			IPM
Mean	17.64583	8.749391	7.324304	6852.357
Median	18.00000	8.510000	7.275000	6804.500
Maximum	26.23000	12.65000	17.97000	8541.000
Minimum	6.900000	5.590000	0.370000	5897.000
Std. Dev.	4.094540	1.370775	3.285120	506.0557
Skewness	-0.371765	0.709429	0.271392	0.866945
Kurtosis	2.769808	3.363211	3.195093	4.110346
Jarque-Bera	5.805816	20.55700	3.188151	40.62609
Probability	0.054863	0.000034	0.203096	0.000000
Sum	4058.540	2012.360	1684.590	1576042.
Sum Sq. Dev.	3839.244	430.2965	2471.370	58645151
Observations	230	230	230	230

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y